IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITALISASI TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI DESA WARU, KECAMATAN WARU, KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Oleh:

Mochamad Wibisono

(E042313060)

PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Mochamad Wibisono

NIM : E042313060

Jurusan : Filsafat Politik Islam

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Februari 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

47AHF321837070

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Mochamad Wibisono

NIM : E042313060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **Mochamad Wibisono** ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 20 Mei 2019

Pembimbing

Dr. H. M. ISMAIL,S.Sos, MH, M.Si

NIP. 196005211986081001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh **Mochamad Wibisono** ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 20 Februari 2020

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. H. Kunawi, M.Ag
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji :
Ketua,

Dr. H. M. Ismail S. Sos, M.H., M.Si
NIP. 196005211986081001

Sekretaris,

Laili Bariroh, M. Si
NIP. 197711032009122002

Penguji I,

Dr. Khoirul Yahya, S. Ag, M. Si
NIP. 197202062007101003

Penguji II,

M. Anas Fakhruddin, S. Th. I, M. Si
NIP. 198202102009011100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Mochamad Wibisono
NIM : E042313060
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITALISASI TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI DESA WARU, KECAMATAN WARU, KABUPATEN SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 – 03 - 2020

Penulis

METERAI TEMPEL
F322363145
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Mochamad Wibisono)
E042313060

ABSTRAK

Mochamad Wibisono, 2020. Implementasi Kebijakan Digitalisasi tentang sistem Informasi Desa di Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo . Skripsi Program Filasafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Digitalisasi tentang sistem Informasi Desa Di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Ada dua rumusan masalah terkait penelitian ini 1.) Bagaimana Implementasi Kebijakan Digitalisasi tentang sistem Informasi Desa di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, 2.) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam Implementasi Kebijakan Digitalisasi tentang sistem Informasi Desa di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian ini adalah mengenai inovasi pelayanan berbasis online, dengan melihat faktor pendorong dan penghambat dari kebijakan. Jenis penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan, yang berangkat dari fenomena yang terjadi di lapangan. Metode penelitan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sehingga dalam penulisan dapat lebih obyektif dan sistematis. Untuk teknik pengumpulan data berdasarkan sumber primer dan sumber skunder yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini bisa menjadi valid. Penggunaan teori kebijakan dalam penelitian ini difokuskan untuk menganalisis alur kebijakan ini, mulai dari akar masalah kemudian muncul sebuah gagasan dan dirumuskan oleh pemangk u kebijakan. Lalu diterapkan kepada masyarakat dan dievalusasi apa faktor yang menjadi kekurangan dari program ini. Teori yang digunakakan memakai Teori Kebijakan Publik menurut David Easton.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Implementasi kebijakan digitalitalisasi entang sistem informasi desa Di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Pertama implementasi kebijakan ini melalui sosialisasi beberapa unsur pemerintahan terkecil yakni Rt maupun Rw yang siap mensosialisasikan di wilayahnya masing-masing. Proses sosialisasi ini disampaikan melalui forum-forum masyarakat baik lingkup Rt maupun Rw dan langsung disampaikan pada masyarakat sebagai *user*. Namun proses implentasi ini masih belum optimal karena kurang meratanya informasi kepada masyarakat. Dilihat dari wilayah masing-masing Rt /Rw memang berbeda-beda, ada wilayah yang lingkungan pemukiman padat penduduk, dan ada juga yang wilayahnya lingkungan perumahan, sehingga ada perbedaan kendala yang dihadapi di masing-masing wilayah. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam implementasi kebijakan digitalitalisasi tentang sistem informasi desa Di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Faktor yang mendorong program ini adalah supportnya masyarakat dengan sebuah sistem yang semakin memudahkan. Faktor lainya yang menjadi pendukung dari program ini, adalah tersedianya dua aspek penting yakni sumberdaya finansial desa dan juga sumberdaya manusia. Sedangkan faktor Penghambat dari implementasi digitalisasi informasi desa yakni faktor kurang optimalnya database masyarakat dan juga kualitas kecepatan internet milik desa yang menjadi penyebab kurang maksimalnya kebijakan ini.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Digitalisasi, Sistem Informasi Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Batasan Penelitian 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 7
F. Definisi Konseptual 7
1. Implementasi 8
2. Kebijakan Publik 9
3. Digitalisasi 11
4. Sistem Informasi Desa 14
BAB II KAJIAN TEORI
A. Penelitian Terdahulu 17
B. Kebijakan Publik 21
C. Kebijakan Publik Menurut David Easton 22
D. Teori Implementasi Menurut Edward III 24
E. Teori Implementasi Kebijakan 27
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 31
B. Lokasi Penelitian 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pemilihan Informan 32
D. Sumber Data dan Jenis Data 33
E. Teknik Pengumpulan Data 35
F. Analisis Data 37
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 37
H. Sistematika Pembahasan 38

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data 40
1. Gambaran Umum Desa Waru 40
a. Kondisi geografis Desa Waru 40
b. Kondisi Demografis Desa Waru 43
B. Data dan Fokus Penelitian 50
1. Profil Desa Waru 50
2. Program Sistem Informasi Desa di Desa Waru 71
C. Analisa Dan Pembahasan 76
1. Implementasi kebijakan digitalitalisasi Tentang Sistem Informasi Desa Di Desa Waru 76
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam Implementasi Kebijakan Digitalitalisasi Tentang Sistem Informasi Desa di Desa Waru .. 86
D. Temuan Hasil Penelitian 92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 97
B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Desa Waru merupakan desa yang secara geografis terletak di wilayah Kabupaten Sidoarjo, lebih tepatnya di Kecamatan Waru. Desa Waru memiliki jumlah penduduk 6.119 jiwa. Dengan luas wilayah 106.316 Ha. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar pemerintah desa berusaha untuk memberikan pelayanan dan informasi secara baik dan efisien. Dengan adanya impelemtasi kebijakan tentang digitalisasi tentang sistem informasi desa, dapat mempermudah arus informasi kepada masyarakat. Pemerintah desa sendiri juga sangat dipermudah dalam hal pelayanan dengan masyarakat. implementasi kebijakan digitalisasi tentang sistem informasi desa di Desa Waru diharapkan menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah keterbukaan informasi desa yang ada.

Kebijakan merupakan pelayanan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan politik. Artinya dengan demikian Kebijakan Publik sangat berkaitan dengan administasi negara ketika publik aktor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai Kebijakan Publik atau umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Kebijakan Publik sebagai arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan yang timbul atau muncul dalam masyarakat. Implementasi Kebijakan Publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kebijakan Publik berusaha untuk meninjau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagi teori dan proses yang terjadi dalam Kebijakan Publik. Dapat dikatakan bahwa Kebijakan Publik tidak lepas dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, salah satu tujuan studi Kebijakan Publik adalah untuk menganalisis bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan tersebut sehingga terwujudlah suatu Kebijakan Publik tertentu.[1] Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.[2]

Kebijakan Publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah.[3] Fokus utama dari Kebijakan Publik dalam negara modern yaitu pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Pada sisi yang lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta untuk mencapai amanat konstitusi.

---

[1] Budi Winarno, Kebijakan Publik,Yogyakarta, Media Presindo,2007, Hal 23.,
[2] Soenarko, Public Policy Pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan pemerintah, Surabaya, Airlangga Univercsity Press, 2000, Hal 4,.
[3] Rusadi kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Bandung, Sinar baru Offset, 1998, Hal26,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan Publik biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang (UU), peraturan presiden, dan peraturan daerah (perda) merupakan bentuk-bentuk Kebijakan. Kebijakan Publik atau kebijakan umum merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat.[4] Dengan kata lain, Kebijakan Publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Digitalisasi memiliki arti *Nomina (kata benda)* proses pemberian atau pemakaian sistem digital: implementasi digitalisasi di negara kita baru pada saluran transmisi.[5] Hal inilah menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mendalami tentang kebijakan Digitalisasi dalam pelayanan publik di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Suatu model budaya politik dapat dikaitkan dengan suatu sistem politik, termasuk juga jika dilihat dari aspek kebijakan yang diambil oleh pemerintahan disuatu daerah.[6]

Digitalisasi adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk mengubah mainset masyarakat yang negatif terhadap pemerintah. Sudah saat proses administrasi berubah dari yang birokratis ke proses digitalisasi. Setidaknya ada 3 aspek harus dirubah. Yaitu orientasi, proses administrasi, dan cara penyampaian pelayanan. Paling menonjol disini adalah cara penyampaian pelayanan. Jika dulunya atau sekarang masih juga dilaksanakan adalah pelayanan administrasi

[4] Soenarko, Public Policy Pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan pemerintah, Surabaya, Airlangga Univercsity Press, 2000, Hal 180,.

[5] http://pusattesis.com/tesis-pelayanan-implementasi-kebijakan-pelayanan-administrasi-terpadu/ diakses pada 02 -11-2018 pukul 13,25

[6] Rusadi kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Bandung, Sinar baru Offset, 1998, Hal29,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksakan secara interaksi antar personal, artinya ada tatap muka atau *face-to-face*. Tetapi dalam digitalisasi diharapkan adanya pertukaran elektronik dan interaksi *non-face-to-face*. Bisa dibayangkan jika implementasi digitalisasi dilaksanakan 100% tentu kita akan tidak berjumpa pelaksana atau pegawai yang mengurus berkas-berkas kita. Tujuan dari ini adalah untuk menghindari adanya kutipan liar, gratifikasi, dan KKN.[7]

Paradigma yang akan berubah dengan adanya implementasi digitalisasi ini yaitu, Paradigma keterbukan informasi pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit, dan tidak ada kepastian berusaha diatasi melalui penerapan E-government. Paradigma pelayanan publik bergeser dari paradigma birokratis menjadi paradigma digitalisasi yang mengedepankan transparansi dan fleksibilitas, yang akhirnya bermuara pada keterbukaan informasi. Seperti itulah paradigma yang akan dirubah melalui pemerintahan yang baik dan dukungan dari digitalisasi.[8] Hal inilah menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mendalami tentang implementasi kebijakan tentang digitalisasi tentang sistem informasi desa di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Mengenai pelaksanaan suatu kebijakan sesungguhnya sudah di fikirkan dan di pertimbangkan sejak kebijakan itu di rumuskan, namun perlu diketahui dengan baik bagaiamana pelaksanaan kebijakan itu dilakukan.[9] Dapat dikatakan

---

[7] Soenarko, Public Policy Pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan pemerintah, Surabaya, Airlangga Univercsity Press, 2000, Hal 176,.

[8] http://ikramshare.blogspot.co.id/2015/08/e-government-era-teknologi-peningkatan.html. (12 Februari 2017, 19.45. Wib)

[9] Soenarko, Public Policy Pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan pemerintah, Surabaya, Airlangga Univercsity Press, 2000, Hal 180,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kebijakan yang ada sering tidak sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh masyarakat pada umumnya, tidak sedikit Kebijakan Publik tidak menguntungkan masyarakat sebagai sasaran utama kebijaan tersebut malahan merugikan negara secara langsung karena kebijakan yang tidak efektif.

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Sidoarjo adalah tentang Sistem Informasi Desa yang dimana dalam kebijakan ini menyatukan segala jenis informasi kependudukan yang ada di dalam pemerintahan desa. Kebijakan tentang sistem informasi desa bertujuan untuk mempermudah informasi bagi masyarakat desa untuk mengetahui segala jenis informasi seperti dalam kegiatan PKK, LPMD dan Karang Taruna. Sehingga masyarakat bisa secara cepat mengetahui segala macam informasi yang ada di desa tersebut.

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana implementasi dari pengelolaan sistem informasi desa tersebut, apakah sudah sesuai dengan standart oprasional yang telah di tetapkan oleh pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Dari sisi lain peneliti juga akan menggali informasi tentang faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi dari kebijakan tersebut, sehingga nantinya akan di dapatkan banyak informasi tentang penerapan tentang implementasi kebijakan digitalitalisasi tentang sistem informasi desa Di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas. Maka, untuk lebih memfokuskan kajian masalah pada penelitian ini. Peneliti, menyajikan rumusan masalah dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan digitalitalisasi tentang sistem informasi desa di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam implementasi kebijakan digitalitalisasi tentang sistem informasi desa di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ?

C. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, yang berjudul "implementasi kebijakan digitalitalisasi tentang sistem informasi desa di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Peneliti akan fokus meneliti tentang bagaimana penerapan kebijakan digitalisasi tentang sistem informasi desa di Desa Waru. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat memudahkan pemerintah desa dalam menyapaikan informasi agar masyarakat mengetahui akan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di desa, Peraturan Desa (PerDes), Panduan Pelayan Desa, Profil Desa, serta informasi apapun terkait dengan desa. Namun didalam pelaksanaannya, tentunya terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat dalam penerapan kebijakan tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Maka, peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan digitalitalisasi tentang sistem informasi desa Di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam implementasi kebijakan digitalitalisasi tentang sistem informasi desa Di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

E. Manfaat Penelitian

Dapat peneliti paparkan beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kebijakan publik khususnya dalam kajian ilmu politik, sehingga dapat memahami secara teoritis bagaimana kebijakan publik di bidang politik.

2. **Manfaat Praktis**

   Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak yang terkait agar menerapkan kebijakan secara tepat. serta dapat memberikan pemahaman tentang kebijakan publik, kepada masyarakat akan pentingnya penerapan kebijakan publik. Dengan kebijakan publik tersebut, elit dapat mengamalkan atau mengimplementasikan untuk menciptakan kebijakan yang efisien yang berdampak pada iklim politik yang baik.

F. Definisi Konseptual

1. **Implementasi**

   Implementasi biasanya akan dilakukan setelah sebuah kebijakan yang telah dirumuskan, dalam proses pembuatan kebijakan ini merupakan sebuah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitas dalam rangka menjalankan sebuah kebijakan kepada masyarakat umum sehingga kebijakan tersebut dapat membawa sebuah hasil yang telah diinginkan masyarkat.[10] Kemudian Menurut Usman mengatakan bahwa Sebuah implementasi akan bermuara pada sebuah aktivitas, tindakan, aksi atau adanya sebuah mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas , tapi sebuah kegiatan yang telah terencana dan untuk mencapai tujuan tertentu.[11]

Selanjutnya Guntur berpendapat bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan dalam sebuah proses interaksi antara tujuan serta tindakan untuk mencapainya dan memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang cukup efektif.[12]

Oleh karna itu melihat pengertian implementasi yang telah dikemukakan menurut ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah sebuah proses untuk melaksanakan ide, proses aktivitas baru dengan harapan orang lain bisa menerima serta dapat melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi guna terciptanya sebuah tujuan yang dapat tercapai dengan adanya jaringan pelaksana yang dapat dipercaya. Ditambahkan lagi oleh Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapat bahwa Implementasi atau pelaksanaan sebagai sebuah proses guna menjalankan kebijakan menjadi suatu tindakan kebijakan

[10] Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hlm. 295

[11] Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. (Jakarta: Grasindo. 2002), Hlm. 70

[12] Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka. 2004), Hlm 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari politik kedalam administrasi. Pengembangan dari sebuah kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program yang telah ada sebelumnya.[13]

Selanjutnya dari berbagai pengertian-pengertian yang telah dijabarkan diatas memperlihatkan jika kata implementasi adalah sebuah mekanisme yang ada pada suatu sistem. Kemudian berdasarkan pendapat dari para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi merupakan sebuah kegiatan yang telah terencana, dan bukan hanya sebuah aktifitas dan akan dilakukan secara baik dan benar dengan berdasarkan norma-norma tertentu guna untuk mencapai tujuan kegiatan. Sebab itu, impelementasi tidak akan berdiri sendiri tetapi akan dan dapat dipengaruhi oleh objek-objek lainnya.

2. Kebijakan Publik

Menurut Budi Winarno[14], istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada "kebijakan luar negeri Indonesia" , "kebijakan ekonomi Jepang", dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.[15]

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino[16] mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat

[13] Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya. 2002), Hlm. 67

[14] Budi Winarno,2005.Kebijakan Publik : Teori Dan Proses Edisi Revisi,Media Presindo.Yogyakarta. Hlm 15.

[15] Budi Winarno, Teori Kebijakan Publik (Pusat Antara Universitas Studi Sosial, Universitas Gaja Mada, Yogyakarta , 1989)., Hal. 15

[16] Agustino,Leo.2008. Dasar-dasar kebijakan Publik, Alfabeta: Bandung.Hlm 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design* .[17] Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi[18] kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan.*Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan.Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan - aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy [19] mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *" a purposivecourse of action followed by an actor or set of actors in dealing with aproblem or matter of concern"* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.Pendapat

[17] Suharno.2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta : UNY Press. Hlm 11
[18] Islamy, M Irfan. (1997). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 15.
[19] Ibid,Hlm 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.[20]

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno[21] dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

3. Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi, dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. Digitalisasi memerlukan peralatan seperti

[20]Budi Winarno. 2005. Kebijakan Publik : Teori Dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta. Hlm 17.

[21] Budi Winarno, Teori Kebijakan Publik (Pusat Antara Universitas Studi Sosial, Universitas Gaja Mada, Yogyakarta , 1989)., Hal. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komputer, scanner, operator media sumber dan software pendukung. Sedangkan menurut Lasa Hs, Digitalisasi adalah proses pengelolaan dokumen tercetak/ printed document menjadi dokumen elektronik.[22]

Digitalisasi merupakan proses konversi dari segala bentuk fisik atau analog ke dalam bentuk digital[23]. Feather mendefinisikan digitalisasi sebagai transkripsi data ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses secara langsung dengan menggunakan komputer. Definisi yang lebih lengkap diungkapkan oleh Smith (1996), *"... the converting of a printed page to digital electronic form through scanning to create an electronic page image suitable for computer storage, retrieval and transmission*". Secara garis besar berarti bahwa digitalisasi adalah proses konversi bentuk tercetak ke dalam bentuk elektronik melalui proses pemindaian (*scan*) untuk menciptakan halaman elektronik yang sesuai dengan penyimpanan, temu kembali dan transmisi komputer.

Dalam *Library for Information Science* disebutkan bahwa digitalisasi adalah "*the proses of converting data to digital format for processing by computer. In information system, digitization usually refers to conversion of printed text or images (photograph, illustration, maps, etc) into binary signal using some kind of scanning device that enables the result to be displayed on a computer*". Artinya bahwa digitalisasi adalah proses konversi data ke dalam

[22] Neneng Asaniyah, "PELESTARIAN INFORMASI KOLEKSI LANGKA: Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi", Pustakawan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: Buletin Perpustakaan No. 57 Mei 2017. Hlm. 89

[23] Deegan, C., 2002. Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosure – a Theoritical Foundation, Accounting, Auditing and Accountibility Journal, Vol. 15, No. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk digital untuk diproses melalui komputer. Dalam sistem informasi, digitalisasi umumnya mengacu pada konversi teks tercetak ataupun gambar (foto, ilustrasi, peta, dsb) ke dalam sinyal biner, dengan menggunakan peralatan pemindaian (*scanner*) sehingga hasilnya dapat ditampilkan di komputer.

Pada dasarnya digitalisasi bertujuan untuk memudahkan akses bagi pengguna perpustakaan. Dengan adanya koleksi dalam format digital, pengguna perpustakaan dapat mengakses informasi tanpa harus mendatangi gedung perpustakaan secara fisik sepanjang tersedia fasilitas internet. Digitalisasi merupakan salah satu bentuk pelestarian koleksi, yaitu dengan mengalihbentukkan koleksi analog menjadi digital. Namun adanya proses digitalisasi ini memunculkan permasalahan baru, yaitu tentang bagaimana melestarikan koleksi dalam format digital tersebut. Lebih lanjut secara tegas disampaikan bahwa kalaupun semua koleksi telah dialihbentukkan menjadi digital, masalah pelestarian tetap menjadi kendala sebab sampai saat ini belum terpikirkan cara melestarikan koleksi digital tersebut.

Digitalisasi adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk mengubah pola pikir masyarakat yang negatif terhadap pemerintah. Sudah saat proses administrasi berubah dari yang birokratis ke proses digitalisasi. Setidaknya ada 3 aspek yang harus dirubah, yaitu orientasi, proses administrasi, dan cara penyampaian pelayanan. Paling menonjol disini adalah cara penyampaian pelayanan. Jika dulunya atau sekarang masih juga dilaksanakan adalah pelayanan administrasi dilaksakan secara interaksi antar personal, artinya ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tatap muka atau *face-to-face*.[24] Tetapi dalam digitalisasi diharapkan adanya pertukaran elektronik dan interaksi *non-face-to-face*. Bisa dibayangkan jika implementasi digitalisasi dilaksanakan 100% tentu kita akan tidak berjumpa pelaksana atau pegawai yang mengurus berkas-berkas kita. Tujuan dari ini adalah untuk menghindari adanya kutipan liar, gratifikasi, dan KKN.[25]

Paradigma yang akan berubah dengan adanya implementasi digitalisasi ini yaitu, Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit, dan tidak ada kepastian berusaha diatasi melalui penerapan e-government. Paradigma pelayanan publik bergeser dari paradigma birokratis menjadi paradigma digitalisasi yang mengedepankan transparansi dan fleksibilitas, yang akhirnya bermuara pada kepuasan pengguna layanan public. Seperti itulah paradigma yang akan dirubah melalui pemerintahan yang baik dan dukungan dari digitalisasi.[26]

Melihat dalam realita yang terjadi saat ini kebijakan digitalisasi yang diharapkan oleh pemerintah sebagai inovasi yang digadang sebagai kebijaan yang sangat efektif dalam bidang pelayanan publik masih menemui berbagai kendala yang sangat banyak ketika dalam proses pelaksanaanya.

4. Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa adalah sebuah platform teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi untuk mendukung pengeloaan sumberdaya

[24]Subarsono, AG.. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.Hal 97.,

[25] Agus Mulyanto.. Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2009.Hal 21.,

[26]http://ikramshare.blogspot.co.id/2015/08/e-government-era-teknologi-peningkatan.html.(11 Februari 2017, 19.15. Wib)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunitas di tingkat desa.[27] Sistem Informasi Desa (SID) menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Dengan adanya perubahan paradigma pembangunan desa membuat SID menjadi penting peranannya. Karena itu, perlu dikembangkan SID yang sesuai dengan visi UU Desa yakni menjadikan desa kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Oleh karenanya, SID diatur secara khusus dalam UU Desa melalui Pasal 86.[28]

Dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72/2005 tentang Desa tidak diatur secara khusus tentang sistem informasi serupa SID. Undang-Undang Desa ini ingin menegaskan pentingnya SID dalam perencanaan dan pembangunan desa, karena itu dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (5) mewajibkan kepada Pemerintah dan Pemda untuk mengembangkan SID, dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa agar dapat diakses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya. Ayat (6) menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa.

Pasal 86

(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

[27] https://www.opensid.info/ diakses pada 22-02-2019 (pukul 10.15)
[28] http://kedesa.id/id_ID/wiki/pembangunan-desa-pembangunan-kawasan-perdesaan-dan-kerjasama-desa/sistem-informasi-desa diakses pada 12 Februari 2020 pukul 23.28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Rumusan pasal mengalami perubahan dari draft RUU yang diserahkan oleh pemerintah. Sebelumnya dalam RUU, pengaturan tentang SID diatur dalam Pasal 73 dan hanya terdiri dari 4 ayat. Setelah proses pembahasan, rumusan pasal dalam UU Desa menjadi Pasal 86 dan terdiri dari 6 ayat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu digunakan untuk menguatkan hasil penelitian yang dilakukan penulis. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Keterangan	Analisa
1.	Haeruddin, Muhammad Ikbal	JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah), Volume 5 Nomor 1, Juli – Desember 2019. Universitas Muhammdiyah Sidenreng Rappang. Dengan judul *"Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidenreng Rappang"*	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi layanan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di desa Timoreng Panua Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal delapan jenis data pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya untuk mengetahui solusi dari masalah yang ada berdasarkan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik berikut: pengumpulan data reduksi, tampilan data, verifikasi dan kesimpulan kesimpulan. Layanan yang dilakukan di Desa Timoreng Panua masih dengan sistem manual karena berbagai hal yang dihadapi termasuk data yang tidak akurat sehingga pejabat masih melakukan perbaikan. untuk data populasi seperti yang ditemukan di situs web. data kartu keluarga meskipun data seluruh masyarakat di Timoreng Panua telah dimasukkan di situs desa sehingga sementara layanan berbasis web belum sepenuhnya dilaksanakan sampai dibuat untuk meningkatkan data populasi.
2.	Haura Atthahara	Jurnal Politikom Indonesiana, Vol.3 No.1 Juli 2018. e-ISSN : 2528 – 2069. Universitas	Era digitalisasi yang sedang berkembembang pesat dalam bidang Tekonologi, Informasi dan Komunikasi di dunia saat ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Singaperbangsa Karawang. Dengan judul "*Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government : Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Purwakarta*"	internet atau electric government di tingkat pusat hingga tingkat pemerintahan daerah. Aplikasi Ogan lopian merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Diskominfo Pemda Purwakarta yang sejatinya menginginkan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat setempat di bidang kesehatan, keamanan, laporan pengaduan masyarakat hingga pencarian lowongan pekerjaan. Tulisan ini akan menganalisis bagaiaman kualitas pelayanan publik lewat aplikasi Ogan Lopian dan sejauhmana aplikasi tersebut sudah memiliki elemen-elemen penting dalam penerapan e-goverment di Pemda Purwakarta. Penggunaan aplikasi Ogan Lopian dalam pelayanan publik merupakan upaya inovasi yang dikembangkan bagi pemerintah setempat dalam memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan, keamanan, lowongan pekerjaan, laporan pengaduan masyarakat dsb. Meskipun apa yang dilakukan oleh Kabupaten Purwakarta bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia. Aplikasi Ogan Lopian yang diluncurkan oleh Diskominfo Pemda Purwakarta masih membutuhkan pematangan dan pemantapan dalam hal sumber daya infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia pengelola yang dapat menunjang keberhasilan e-government tersebut. Terlepas dari berbagai kekurangannya penerapan egovernment lewat aplikasi Ogan Lopian ini dapat dijadikan contoh bagi pemda-pemda lain yang ingin melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerahnya.
3.	Erick S. Holle	Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011. Dengan judul "*Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatan Public Service*"	Penelitian ini membahas mengenai Kontak langsung dalam penyediaan layanan memberikan peluang besar terjadi praktik maladministrasi (kegagalan memberikan layanan). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan praktik maladministrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kerangka pemerintahan elektronik untuk penyampaian layanan, sehingga kontak langsung antara penyedia layanan dan pengguna layanan tidak lagi terjadi. Di Indonesia, peluang untuk itu sudah ada dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dan Pengembangan Strategi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			elektronik-Pemerintah (electronic-Government framework), dengan tujuan mendukung perubahan tata pemerintahan yang demokratis, memfasilitasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan implementasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, dan memfasilitasi transformasi menuju masyarakat informasi.
4.	Ahmad Sururi	Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Sururi mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Serang Raya pada tahun 2017. Dengan judul "*Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan Empiris)*"	Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis inovasi kebijakan publik dalam perspektif konseptual dan empiris disertai dengan berbagai contoh penerapan kebijakan publik yang berbasis inovatif dari berbagai daerah. Inovasi kebijakan publik sebagai sebuah keniscayaan secara prinsip dan substantif akan memberikan penguatan dalam merespon dan menyelesaikan problematika kebijakan publik yang berlangsung di tengah masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah survei literatur akademis di bidang keilmuan kebijakan publik guna memperoleh konsep-konsep yang relevan dengan kajian inovasi kebijakan publik. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber baik dari dokumen pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik sebagai data sekunder yang kemudian diolah dan dideskripsikan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data. Kemudian dilakukan analisis data berdasarkan teori dan konsep kebijakan publik serta selanjutnya dilakukan proses intreprtasi data. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah adanya upaya-upaya inovasi kebijakan publik yang berdimensi kebaruan dan kemanfaatan sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada upaya yang lebih kongkrit dan membangun partisipasi masyarakat secara berkesinambungan. Inovasi diterapkan bukan hanya pada tahap evaluasi kebijakan publik akan tetapi diterapkan sejak awal perencanaan kebijakan publik, implementasi dan evaluasi kebijakan publik.
5.	Desti Riska Sari	Dalam Skripsi "Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi *Smart Netizen* Pada Kabupaten Lampung	Dalam menghadapi era globalisasi aparatur negara hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Pelayanan publik yang baik berorientasi pada kepuasan penggunanya. Penerapan standar pelayanan publik menjadi tolak ukur yang digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Tengah *(Studi Kasus Desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih)*" tahun 2018 yang ditulis oleh Desti Riska Sari dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayananan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Buyut Udik, pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditemukan bahwa sistem pembuatan KTP yang selama ini berjalan dilakukan secara manual. Sistem yang berjalan secara manual itudimulai dari pengajuan surat rekomendasi kepada Kepala Dusun setempat, pengisian formulir pembuatan KTP, pemeriksaan berkas pembuatan KTP, sampai pengiriman pembuatan KTP ke Kecamatan. Dari sistem manual tersebut, prosedur pelayanan yang berjalan manual pada saat ini tidak efektif dan efisien dikarenakan waktu yang diperlukan dari masa pengajuan hingga pembuatannya selesai membutuhkan masa 15 hari kerja. Pemohon sering kali harus mengeluarkan uang untuk biaya yang tidak seharusnya diperlukan. Sebagian masyarakat Buyut Udik berprofesi sebagai petani, hal ini memungkinkan masyarakat untuk menghemat waktu. Dengan adanya aplikasi *Smart Netizen* untuk pembuatan KTP secara *online* maka permasalahan prosedur pelayanan yang rumit pada sistem pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Desa Buyut Udik akan berjalan lebih baik. Basis data penyimpanan data pemohon KTP akan lebih terorganisir lagi, sehingga nantinya ketika akan mencari data tersebut, data akan mudah untuk diakses dan dipakai lagi. Dengan adanya pelayanan administrasi kependudukan menggunakan aplikasi *Smart Netizen*, maka pelayanan terhadap pemohon KTP, KK, akta catatan sipil dan lain sebagainya akan lebih efektif dan efisien. Efektif karena pemohon tidak perlu melalui prosedur pelayanan yang menyita waktu, pemohon dapat membuat KTP dengan cara mengisi langsung form permohonan melalui login atau masuk ke aplikasi sehingga tidak menghabiskan waktu. Efisien karena dengan adanya aplikasi *Smart Netizen*, maka data pemohon yang diisi melalui form permohonan dapat langsung masuk ke basis data kependudukan, data tersebut langsung di proses hanya dengan waktu singkat KTP sudah dapat di cetak. Hal ini sangat menguntungkan karena pemohon dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			terhindar dari biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan dan juga pemohon tidak perlu lama-lama menunggu KTP tersebut selesai.

B. Kebijakan Publik

Penelitan yang berkaitan dengan dengan kebijakan publik tentunya terlebih dahulu memahami tentang pendefinisian kebijakan.. Kebijakan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik. (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan.[29]

Adapun pengertian yang lain, Kebijakan Publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.[30]

Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum *(public policy)* menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dengan menentukan rencana-

[29]Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik,* (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka, 2009), hal.20
[30]Soenarko, Public Policy Pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan pemerintah, Surabaya, Airlangga Univercsity Press, 2000, Hal 8.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rencana yang mengikat yang dituangkan dalam kebijakan *(policy)* oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah.

C. Kebijakan Publik Menurut David Easton

Menurut David Easton dalam kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk semua masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu.[31]

Kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan dapat dipandang sebagai proses. Proses kebijakan klasik dikemukakan oleh David Easton, yang menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi. Analogi sistem biologi yang di sebutkan oleh Easton merujuk kepada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, dapat membuat kelangsungan hidup yang stabil. Dari system biologi tersebut Easton mengaitkan dengan kehidupan sistem politik, yang mengandaikan kebijakan merupakan hasil dari sistem politik, seperti gambar di bawah ini.

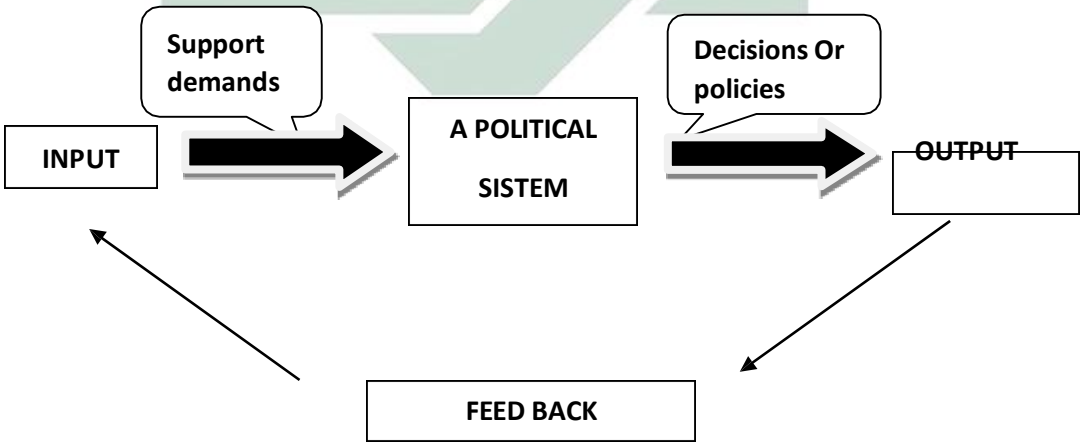

[31]Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka, 2009), hal.21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari proses kebijakan yang di gambarkan oleh Easton, dapat di artikan bahwa proses kebijakan sangat penting yakni suatu *input* yang berupa dukungan maupun tuntutan. Sehingga muncul sebuah sistem politik yang nantinya akan mengakomodir dari tuntutan maupun *support* kemudian dapat menghasilkan sebuah output berupa keputusan atau kebijakan. Sistem Kebijakan Easton ini tergolong dalam model yang sederhana, sehingga dikembangkan oleh para akademisi lain.

Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai *public actor*, terkait dengan Kebijakan Publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Dengan demikian Kebijakan Publik sangat berkait dengan administasi negara ketika *public actor* mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai Kebijakan Publik atau umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara.[32]

Disisi lain Kebijakan Publik sangat berkait dengan administasi negara ketika *public actor* mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai Kebijakan Publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu

[32]Soenarko, *Public Policy Pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan pemerintah*, (Surabaya, Airlangga Univercsity Press, 2000), Hal 10,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan "administrasi negara." Kebutuhan masyarakat tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh individu atau kelompoknya melainkan diperlukan keterlibatan pihak lain yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.[33]

Dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah dengan menerapkan tentang inovasi kebijakan pelayanan publik dalam hal informasi yang berbentuk dalam sebuah data yang dimana dalam data tersebut di pakai untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk apapun seperti dalam pelayanan pembuatan surat-surat untuk kepentingan mengurus Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili atau yang lainnya. Dalam penelitian ini akan kami tinjau lebih dalam tentang analisis kebijakan digitalisasi sistem informasi dalam pelayanan publik di desa waru, yang dimana untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan yang sudah harus dilakukan sesuai dengan intruksi dari pemerintah pusat.

D. Teori Implementasi George C. Edwards III

Selain teori yang dijelaskan diatas penulis juga menggunakan teori lain yakni teori implementasi dari Edward III[34] sebagaimana ditulis dalam Joko Widodo[35] setidaknya mengungkapkan ada empat variabel atau yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memepengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari implementasi sebuah kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi

[33]Pandji Santosa, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, (Bandung: PT.Reflika Aditama, 2008), Hal 34.,

[34] Edward III, George C. *Implementing Public Policy*, (Congressional Quarterly Press, Washington, 1980), Hlm. 10

[35] Joko Widodo, *Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), Hlm. 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lain meliputi variabel atau faktor sumberdaya *(resources)*, komunikasi *(communication)*, serta struktur birokrasi *(bureaucratic structur)*, disposisi *(dispositions).*

1. **Disposisi**

Edward III menegaskan bahwa Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya.[36]

2. **Sumber Daya**

Edward III menjelaskan bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam implementasi sebuah kebijakan.[37] Lebih lanjut Edward III menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan- ketentuan atau aturan- aturan, serta

[36] Edward III, George C, *Implementing Public Policy*, (Congressional Quarterly Press, Washington, 1980), Hlm. 53
[37] Edward III, George C, *Implementing Public Policy*, (Congressional Quarterly Press, Washington, 1980), Hlm. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan- ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan atau implementator yang bertanggung jawab untuk menjalankan ataupun mengimpementasikan sebuah kebijakan tetapi kurang dalam hal sumber-sumber daya untuk menjalankan atau melaksanakan pekerjaan secara efektif dan baik, maka implementasi dari sebuah kebijakan tersebut tidak akan efektif.

3. Struktur Birokrasi

Lebih lanjut Edward III mengungkapkan bahwa Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidakefisienan struktur birokrasi (deficiencies in bureaucratic structure).[38]

Struktur birokrasi ini mencakup aspek- aspek seperti pembagian kewenangan ,struktur arganisasi, hubungan organisasi dengan pihak lain ataupun organisasi lainnya, hubungan antara unit-unit yang ada dalam suatu organisasi.

4. Komunkasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

[38] Ibid, 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Teori Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi suatu kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran direncanakan terlebih dahulu yang dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang tentang suatu kebijakan dikeluarkan dan dana yang disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut telah tersedia. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis.[39] Implementasi Kebijakan Publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. [40]Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Terbentuknya birokrasi yang bersih bebas dari praktek KKN melalui pembenahan sistem pengelolaan anggaran, perbaikan kesejahteraan pegawai penegakan aturan-aturan hukum, peningkatan pengawasan. Efisien dilakukan melalui program penghematan bagi pembiayaan operasional birokrasi.[41] Transparan dibukanya ruang publik dapat mengakses secara luas penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum. Melayani

[39]Edhy Sutana. Sistem Informasi Manajemen. Graha Ilmu. Yogyakarta . 2003.Hal, 75.,
[40]Rusadi kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Bandung, Sinar baru Offset, 1998, Hal22.,
[41]Subarsono, AG.. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.Hal 67.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengubahan birokrasi yang premordialisme atau minta dilayani menjadi birokrasi yang melayani masyarakat.[42]

Menjelaskan konsep implementasi kebijakan sebagai alat administrasi hukum di mana berbagai aktor,organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.Implementasi suatu program pada dasarnya adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya suatu kebijakan dioperasionalkan dan mempermasalahkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran.[43] Di samping itu, untuk mengetahui bagaimana hubungan suatu variabel tertentuterhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu.

Terdesentralisasi pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan kepada aparatur terdekat. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara (pemerintah) dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan

[42]A.Rahman. Sistem Politik Indonesia, yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, Hal, 175.,
[43]Pandji Santosa, Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: PT.Reflika Aditama, 2008, Hal 84.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat.[44] Kata publik menunjukkan pada sejumlah orang yang mempunyai kebebasan berpikir, perasaan , harapan, norma yang mereka miliki. Pelayanan publik yaitu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan sikap dan tindakan yang benar berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki.

Sebagian dari pelayana publik yang harus diberikan oleh pemerintah adalah menyediakan jasa publik. Jasa publik adalah barang dan layanan publik juga hanya untuk jasa publik orang yang memanfaatkan dikenai imbalan jasa dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan . maksudnya orang yang memanfaatkan barang dan layanan publik tersebut harus membayar dengan biaya tertentu sesuai dengan tarif yang ditetapkan pemerintah, misalnya layanan pembuatan KTP, sertifikat tanah, pencatatan perkawinan, surat keterangan jalan, pembuatan paspor pembuatan pemeriksaan bandara atau pasar, dan pemberian ijin adalah termasuk pelayanan publik sekaligus jasa publik karena orang yang memanfaatkan layanan tersebut.

Penerapan dalam inovasi kebijakan publik tentang sistem informasi pelayanan publik yang dimana dalam pelaksanaanya kurang efektif atau belum berjalan dengan baik mengingat dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga dalam bidang pelayanan pubik dalam hal ini pemerintah harus di tuntut secara responsif untuk mengimbangi teknologi dan pelayanan sehingga masyarakat

[44]Soenarko, Public Policy Pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan pemerintah, Surabaya, Airlangga Univercsity Press, 2000, Hal 193 ,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan haknya untuk mendapatakan pelayanan secara cepat dan tepat tanpa harus menunggu lama.

Dalam penelitian ini akan di bahas tentang bagaimana penerapan yang ada di Desa Waru dalam hal pelayanan publik yang menggunakan sistem digitalisasi informasi, sebagai bentuk inovasi dalam sebuah pelayanan. Apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang di harapkan oleh pemerintah sebagai langkah awal untuk penerapan kebijakan yang tepat sasaran atau hanya sebagai penyeimbang bagi pemerintah mengikuti perkembangan zaman di teknologi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul "implementasi kebijakan digitalitalisasi tentang sistem informasi desa di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo". Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah kualitatif deskriptif, metode kualitatif deskriptif bergantung pada keterangan dari informan sebagai subjek dari penelitian. Dalam metode kualitatif mempunyai karakteristik bersifat deskripsi. Pemilihan informan di lakukan, sebagai kunci pemegang sumber yang paling akurat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Dengan menggunakan penelitian lapangan, dapat dipergunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan untuk menemukan, membuktikan dan mengembangkan dari pengetahuan tertentu dan pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengatasi suatu masalah.[45]

Maka daripada itu, penelitian ini berawal dari studi kasus di lapangan, dengan tujuan untuk memperoleh sebuah data yang sebenarnya. Sehingga penulis mendatangi tempat yang menjadi lokasi penelitian, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menemui informan untuk memperleh data yang akurat.

[45] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2010, Bandung: Alfabeta, hal. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Waru sesuai dengan judul " Implementasi Kebijakan Digitalitalisasi Tentang Sistem Informasi Desa di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo *(Studi Kasus Tentang Sistem Informasi Desa)*". Waru merupakan salah satu desa di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang telah menerapkan sistem *online.* Lokasi wawancara akan dilakukan di balai atau kantor Desa Waru.

Peneliti memilih penelitian di Desa Waru, karena di desa tersebut merupakan salah satu desa yang telah menerapkan serta memberikan informasi kepada publik menggunakan Sistem Informasi Desa (SID). Selain itu Desa Waru sendiri merupakan desa yang strategis, karena mempunyai jumlah masyarakat yang besar dan juga dilengkapi dengan infrastruktur maupun SDM yang memadai.

C. Pemilihan informan

Adapun Informan yang digali oleh peneliti pada penelitian implementasi kebijakan digitalitalisasi tentang sistem informasi desa di Desa Waru adalah:

1. Kepala desa
2. BPD
3. LPMD
4. Tokoh Masyarakat

Dengan informan tersebut diharapkan dapat semaksimal mungkindalam memberikan informasi kepada peneliti agar dapat digali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seakurat mungkin. Dalam teknik penentuan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *Purpossive Sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.[46] Untuk mendapatkan informasi yang akurat, peneliti menentukan informan, yakni Kepala Desa, BPD dan LPMD, sebagai pelaku dalam munculnya kebijakan ini, serta dilengkapi data dari tanggapan beberapa tokoh masyarakat.

D. Sumber data dan jenis data

Sumber data adalah subjek yang memberikan data sesuai dengan klasifikasi data penelitian. Data dalam penelitian dapat diambil dari berbagai surber, sumber data dapat dibedakan melalui data primer dan data skunder. Dengan mengidentifikasi sumber data, akan memudahkan peneliti dalam memilih metode pengumpulan data guna memudahkan dalam proses melakukan pengumpulan data.[47] Sumber data dibagi menjadi:

1. Sumber data Primer

Data yang yang diperoleh langsung dari subjek peneliti dengan menggunakan alat pengambilan data, langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[48] Sumber data primer adalah sumber data yang paling utama dan sifatnya mendasar dalam

[46] Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya (Jakarta: Fajar Interpratama, 2007), 107.
[47] Ulber Silalahi,Metode Penelitian Sosial(Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 91
[48] Syaifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010. Hal, 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini. Hasil data diperoleh dari informan setelah melakukan proses wawancara atau terjun langsung ke lokasi penelitian. Sumber data primer diperoleh dari informan yang dapat memberikan informasi mengenai keadaan atau hal-hal yang dibutuhkan tentang penelitian ini. Sehingga proses untuk memperoleh data informan memiliki peran dan fungsi, yaitu memberikan tanggapan atau jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan.

2. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diambil atau diperoleh dari bahan pustaka yaitu mencari data atau informasi, yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, internet, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.[49] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan pustaka seperti arsip-arsip yang ada di kantor Desa.

Dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan adalah literatur dan dokumentasi. Sumber literatur sebagai rujukan atau sebagai referensi yang dijadikan sebagai bahan kajian untuk memperoleh data teoritis dengan cara mempelajari literatur yang berhubungan dengan kajian pustaka dan permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini baik yang berasal dari dari buku maupun internet seperti jurnal online dan artikel jurnal atau koran yang mengangkat tema mengenai digitalisasi pelayanan

[49] Suharsimi Arikunto, Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hal. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

publik. Sedangkan untuk dokumentasi sebagai tambahan, dimana bisa berupa foto maupun dokumen dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data kualitatif pada penelitian ini, menggunakan teknik:[50]

1. Wawancara

Dalam proses wawancara peneliti turun langsung ke lapangan, dengan melakukan proses tanya jawab terhadap informan terkait inovasi kebijakan digitalisasi pelayanan masyarakat di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Informasi berupa data akan didapat langsung melalui informan dengan proses wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *indepth interview* atau wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan suatu cara dalam proses penggalian data atau informasi dengan cara bertatap muka secara langsung, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam. Peneliti telah menentukan beberapa informan yang akan digali informasinya terkait dengan digitalisasi informasi desa. Dari pihak yang berkaitan dengan kebijakan yakni Kepala Desa, BPD() dan LPMD (). Dari pihak masyarakat sebagai *user* peneliti akan menggali dari tokoh masyarakat yang ada di Desa Waru.

[50]Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) hal. 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan wawancara terstruktur yakni setiap informan diberikan pertanyaan yang sama. Dalam wawancara berstruktur peneliti juga telah menyiapkan instrument atau daftar pertanyaan.[51] Dalam proses wawancara, seperti yang telah disebutkan diatas, peneliti mempersiapkan instrumen pertanyaan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan adanya inovasi kebijakn di Desa Waru.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk mencari data mengenai suatu hal yang berasal dari pihak lain yang berupa catatan, buku, surat kabar.[52] Dokumentasi bisa berbentuk gambar maupun arsip atau dokumen yang diperoleh dari informan. Dokumentasi sebagai sumber informasi tambahan, untuk membuktikan penelitian ini. Dengan mengumpulkan dokumentasi untuk melengkapi data-data yang di butuhkan langsung dari lapangan. Data atau dokumen-dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data mengenai hasil wawancara maupun hasil penelitian yang telah dilakukan dengan informan baik dari pemerintah desa maupun masyarakat Desa Waru.

[51] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta CV, 2010), hal 273

[52] Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) hal. 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Analisis Data

Analisis data pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti objek penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dan dijabarkan secara sistematis. Adapun dengan menggunakan Reduksi Data, Kategorisasi, dan Sintesisasi. Pertama Reduksi data yakni mengidentifikasi data yang sesuai dengan fokus dan masalah penelitian, yang kedua Kategorisasi, merupakan teknik analisis data berupaya memilah-milah kepada bagian data yang memiliki kesamaan, dan yang ketiga Sintesisasi, setelah data ditemukan kesamaannya maka data dicari kaitan antara satu kategori dengan kategori yang lainnya, sedangkan kategori yang satu dengan yang lainnya diberi nama/label.[53]

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik trianggulasi data. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik trianggulasi yang paling banyak digunakan yaitu trianggulasi sumber.[54] Teknik peneliti mencoba menanyakan kembali pertanyaan kepada informan, dan mengajukan pertanyaan kepada informan satu dengan yang lainnya. Agar nantinya data yang diperoleh peneliti akurat.

[53] Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Hal 288-289.
[54] Ibid, hlm 330

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik keabsahan data perpanjangan keikutsertaan, disini peneliti dalam pengumpulan data karena peneliti disini harus ikutserta dalam memperoleh data yang valid.
2. Teknik keabsahan data ketekunan/keajegan pengamatan, peneliti disini harus juga tekun untuk mencari data yang valid serinci mungkin yang nantinya peneliti nanti lebih bersifat terbuka.
3. Teknik keabsahan data hasil pemeriksaan sejawat melalui diskusi, diskusi merupakan tenik keabsahan yang hampir terakhir, dikarenakan data yang ditemukan nanti masih didiskusiakn dengan rekannya dan teknik keabsahan data uraian rinci.
4. Teknik keabsahan data yang terakhir adalah uraian rinci, peneliti sangat strategis dalam menekuni hasil dari temuan data dicari serinci mungkin sesuatu yang relevan dengan pokok bahasan

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap suatu penelitian, maka hasil penelitian disusun sistematika sebagai berikut :

1. **BAB I PENDAHULUAN**

   Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka.

2. **BAB II KERANGKA TEORI**

   Kajian Teori ini terdiri dari penelitian terdahulu dan beberapa pengertian dari teori Kebijakan Publik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada Bab ini berisi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Pemilihan informan, Sumber data dan jenis data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data, dan Sistematika Pembahasan

4. **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis memaparkan seluruh uraian tetang hasil penelitian, juga pada bab ini penulis melakukan pembahasan serta menganalisa data, yaitu memaknai hasil penelitian dari inovasi kebijakan publik tentang digitalisasi pelayanan masyarakat yang diterapkan pada sistem informasi desa.

5. **BAB V PENUTUP**

Bab ini pada umunya merupakan bab yang memaparkan kesimpulan dari suatu pembahasan, serta saran dari peneliti untuk kedepannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Desa Waru

a. Kondisi geografis Desa Waru

Desa Waru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Berdiri pada tahun 1831, waru memiliki historis yang menjadi kepercayaan masyarakat sekitar, dijadikan sebagai lambang penersatu warga waru sendiri. Waru *(wani rukun)* menjadi slogan yang tetap dijaga sampai sekarang ini. Dengan berkembangnya zaman, waru menjadi daerah yang berkembang pesat.

Gambar 4.1
Peta Lokasi Desa Waru

Desa Waru secara geografis berada di wilayah yang strategis, karena dekat dengan akses publik, dan juga sarana atau infrastruktur yang memadai. Desa waru tergolong desa yang besar,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena karena memiliki luas wilayah 106.316 Ha, terbelah menjadi dua wilayah yaitu wilayah timur Jalan Raya dan Barat Jalan Raya. Secara administratif Desa Waru terbagi menjadi 4 dusun adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah RT/RW Tiap Dusun

No.	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Jati	3	10
2	Krajan I	5	17
3	Krajan II	4	16
4	Pesantren	3	6

.*Sumber: RPJM Desa Waru*

Desa ini berbatas an langsung dengan 4 wilayah desa, sebulah utara desa waru berbatasan langsung dengan Desa Kedungrejo, untuk wilayah timur berbatasan dengan Desa Kureksari, sedangkan di wilayah selatan berbatasan dengan Desa Pepelegi Kec. Waru & Desa Sawotratap Kec. Gedangan dan di wilayah barat berbatasan dengan Desa Medaeng & Desa Pepelegi Kec. Waru. adapun batas – batas wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Batas Wilayah Desa Waru

Batas	Keterangan
Sebelah Utara	Desa Kedungrejo Kec. Waru
Sebelah Timur	Desa Kureksari Kec. Waru
Sebelah Selatan	Desa Pepelegi Kec. Waru & Desa Sawotratap Kec. Gedangan
Sebelah Barat	Desa Medaeng & Desa Pepelegi Kec. Waru

Sumber:RPJMDesa Waru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi geografis yang cukup luas dengan terbagi menjadi 4 dusun. Dengan jumlah penduduk waru yang cukup besar, membuat pelayanan admistrasi kurang optimal dan efisien. Maka pemerintah desa menyelaraskan dengan program pemerintah kabupaten, membuat sebuah inovasi terkait dengan sistem pelayanan desa yang berbasis online. Dengan adanya program tersebut dirasa akan berdampak pada pelayanan publik yang optimal dan efisien. Selain itu masyarakat sendiri juga mendapat keuntungkan dengan sistem pelayanan ini. Ada faktor yang mempengaruhi sehingga desa waru mampu dan mau melakukan inovasi pelayanan, salah satunya adalah dengan memiliki infrastruktur yang memadai. Selain itu faktor sumber daya manusianya yang mumpuni sehingga dapat terlaksananya program ini.

Ada faktor yang mempengaruhi pesatnya kemajuan desa waru adalah dekatnya wilayah waru dengan Kota Surabaya yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur. Faktor tersebut menjadikan nilai positif bagi perkembangan desa, banyak berdiri perkantoran milik pemerintah provinsi. Berdiri berbagai pabrik, maupun pertokoan yang membuka lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran, dengan menyediakan kuota tersendiri bagi warga desa. Desa waru sangat diuntungkan dengan berada diposisi strategis tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kondisi Demografis Desa Waru

Dalam penentuan suatu kebijakan aspek yang tidak kalah penting adalah aspek demografis. Jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini, memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan.

1) Penduduk

Bonus demografi mempunyai nilai tambah dalam menerapkan program pelayanan desa berbasis online. Dengan jumlah penduduk 6.119 Orang, jumlah tersebut tergolong desa yang besar. Program pelayanan berbasis online mejadi solusi terhadap keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Penyebaran penduduk terbagi pada Wilayah sebagai berikut.

Tabel 4.3
Persebaran Penduduk Desa Waru

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan
1	Jati	10	338	598	571
2	Krajan I	17	627	1076	1132
3	Krajan II	17	561	995	1001
4	Pesantren	6	234	371	375
Total		50	1760	3040	3079

Sumber: Sid.sidoarjokab.go.id[55]

Dari gambaran diatas bahwa krajan I menjadi daerah yang memiliki jumlah penduduk yang terbanyak, karena di krajan I merupakan daerah pemukiman padat penduduk.

[55] http://sid.sidoarjokab.go.id/waru-waru/index.php/first (diakses pada Kamis, 19 Januari 2019 pukul 21:24 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pesantren menjadi dusun yang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit.

2) Potensi Sumber Daya Manusia

Dari gambaran banyaknya jumlah penduduk, ada faktor penting yang harus melengkapi aspek tersebut. Yakni potensi sumber daya manusia (SDM), SDM menjadi salah satu hal yang penting dalam suksesnya program pelayanan desa berbasis online. Karena SDM dijadikan tolak ukur dari masyarakat sebagai *user* dari program tersebut, apabila mayoritas masyarakat tidak dapat atau tidak mengerti dalam menggunakan layanan publik berbasis online tersebut akan sangat sia-sia. Sehingga peran SDM sangat krusial dalam mensukseskan program pelayanan berbasis online. Dibawah ini terdapat berbagai kelompok umur, sebagai indikator dalam penerapan program ini, sebagai berikut.

Tabel 4.4
Potensi SDM Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok umur	Jumlah orang	
		L	P
1	0 – 14 tahun	233	213
2	15 – 34 tahun	361	406
3	35 – 54 tahun	2195	2185
4	55 tahun keatas	251	275
Jumlah		**3040**	**3079**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa waru merupakan masyarakat yang tergolong masih produktif atau muda dari segi kelompok umur. Sehingga program ini dirasa sangat efektif, karena biasanya anak-anak muda sekarang lebih suka dengan hal-hal yang bersifat online. Terlepas dari faktor tersebut, pelayanan berbasis online dapat mempermudah mereka dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan administrasi desa. Sehingga masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk megurus surat didesa sangat terbantu dengan adanya program ini.

3) Pendidikan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, SDM menjadi pemegang peran penting dalam suksesnya program pelayanan desa berbasis online. Salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pendidikan. Pendidikan didapat dari lembaga-lembaga formal maupun informal, baik swasta maupun negeri. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh akan berdampak kepada tingginya kualitas SDM.

Di Desa Waru sendiri, sudah banyak terdapat lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis agama maupun umum. Sehingga masyarakat Desa Waru sangat memperhatikan pendidikan untuk anaknya, kedepan diharapkan menjadi asset

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berharga, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa waru, guna menjadi warga yang berwawasan dan juga selalu kritis terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil Capaian yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Jenjang Tingkatan Pendidikan Masyarakat

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	183
2	Sekolah Dasar	531
3	SLTP	287
4	SLTA	280
5	Diploma I	1
6	Diploma II	1
7	Strata I	255
8	Strata II	1

Sumber: Sid.sidoarjokab.go.id[56]

Dari data di atas, masyarakat desa waru memiliki asset yang bagus, karena banyaknya warga waru yang masih dalam proses nenempuh pendidikan. Kedepan dapat dijadikan modal dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di desa waru. Selain itu dengan jumlah masyarakat yang masih menepuh pendidikan tersebut, diharapkan dapat berperan

[56] http://sid.sidoarjokab.go.id/waru-waru/index.php/first (diakses pada Kamis, 19 Januari 2019 pukul 21:24 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam segala bentuk kegiatan yang bisa memajukan desa dan berdampak pada masyarakat luas.

4) Aspek Sosial Kemasyarakatan

Dari pengamatan peneliti, aspek sosial kemasyarakatan desa waru sudah baik dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, didesa waru sendiri sudah dibentuk oleh historis yang diyakini sebagai bentuk pemersatu warga. Nama waru (wani rukun) dijadikan sebuah semboyan pemersatu warga, dengan harapan desa ini menjadi desa yang aman tenteram dan sejahtera.

Warga waru sendiri merupakan warga yang sangat antusias, dengan kegiatan-kegiatan sosial. Baiik kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa maupun dari swadaya masyarakat sendiri. Dimana didalam masyarakat sendiri, terdapat oranisasi yang bergerak di bidang sosial keagamaan. Organisasi Nahdlatul Ulama menjadi organisasi terbesar didesa waru, dari mulai pelajar hingga orang tua diwadahi oleh organisasi ini. Nahdlatul Ulama memberikan dampak yang luar biasa didalam masyarakat, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan siosial keagamaan sehingga dapat mempererat hubungan antar masyarakat. Dengan mendapat siraman rohani dan juga memberikan nilai persatuan yang mengedepankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai-nilai toleransi sehingga kehidupan masyarakat dapat saling menghargai dalam keidupan sosial.

Aspek sosial ini menjadi asset yang berharga dalam menerapkan program ini. Program Sistem Informasi Desa (SID) ini sebenarnya bertujuan untuk merekatkan hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat luas dengan memberikan segala bentuk informasi baik dari pemerintah desa sendiri maupun informasi dari pemerintah daerah. Sehingga arus informasi dapat terus diberikan kepada masyarakat, sehingga dapat tersampaikan secara cepat dan tepat. Selain fungsi pemberian formasi fungsi lain dari program ini adalah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

5) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat juga sangat berpengaruah pada sebuah kebijakan. Ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan, karena pada dasarnya kebijakan bertujuan untuk mempermudah bukan untuk memberatkan masyarakat. Pemerintah meninjau apakah di wilayahnya sudah bisa atau mampu dalam penerapan kebijakan ini, dengan melihat perkembangan dan keunggulan di desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Waru sendiri, merupakan desa dengan perkembangan cukup pesat di bidang ekonomi. Sehingga berdampak pada perkembangan pengetahuan teknologi di dalam masyarakat cukup baik, dengan ditunjang oleh sistem jaringan internet yang bagus karena berada diwilayah perkotaan. Sehingga masyarakat dapat mengakses internet dengan mudah.

Oleh karena itu pemerintah desa, meluncurkan sebuah program pelayanan berbasis online, dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang berkembang pesat. Dari *system online* tersebut bukan hanya untuk pelayanan saja, tetapi juga memberikan informasi-informasi salah satunya adalah ekonomi dan potensi yang ada di desa.

Desa Waru memiliki dua potensi unggulan yang ada. Pertama di sektor peternakan, dengan beberapa jenis populasi ternak Sapi, Kerbau, Ayam, Bebek, Kambing dan lain-lainnya, menjadi komoditi unggulan desa, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek kedepan desa maupun pemiliknya.

Kedua adalah sektor industri yang dimaksudkan adalah Industri Rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) atau kelompok. Usaha ini telah berkembang sejak dahulu dan membudaya di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, hal ini didukung kebutuhan pasar cukup menjajikan.

Sesuai dengan kondisi desa yang merupakan daerah padat penduduk maka struktur ekonominya lebih dominan kepada Sektor industri dengan skala besar dan home industri, di samping sektor-sektor lainnya baik berupa pertanian, peternakan, pertukangan dan lain-lainnya. Tingkat Pertumbuhan sektor lainya diluar sektor unggulan/dominan, sangat memungkinkan berkembang dengan adanya sistem informasi desa, sehingga pemerintah dengan mudah membuka jalur pemasaran serta pembinaan.

B. Data dan Fokus Penelitian

1. Profil Desa Waru

Aspek pemerintahan didesa waru menjadi elemen penting dalam program sistem informasi desa. Karena terkait dengan pelayanan yang di berikan kepada masyarakat. Perbaikan demi perbaikan telah dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan yang bagus dan professional kepada masyarakat.

Demi berjalannya pemerintahan yang baik dan profesinal maka akan ada peningkatan kualitas penyelenggara Pemerintahan Desa di bidang administrasi ditempuh melalui peningkatan SDM perangkat desa. Peningkatan pemahaman tugas serta fungsi perangkat desa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jalan pelatihan bagi perangkat desa. Selain itu penting juga berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang ditempuh melalui peningkatan disiplin jam kerja. Dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan kegiatan spesifik yang akan dilakukan. Sehingga membawa organisasi pemerintahan desa fokus pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang jujur, adil dan bijaksana, demi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

a. Struktur Organisasi

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pemerintahan

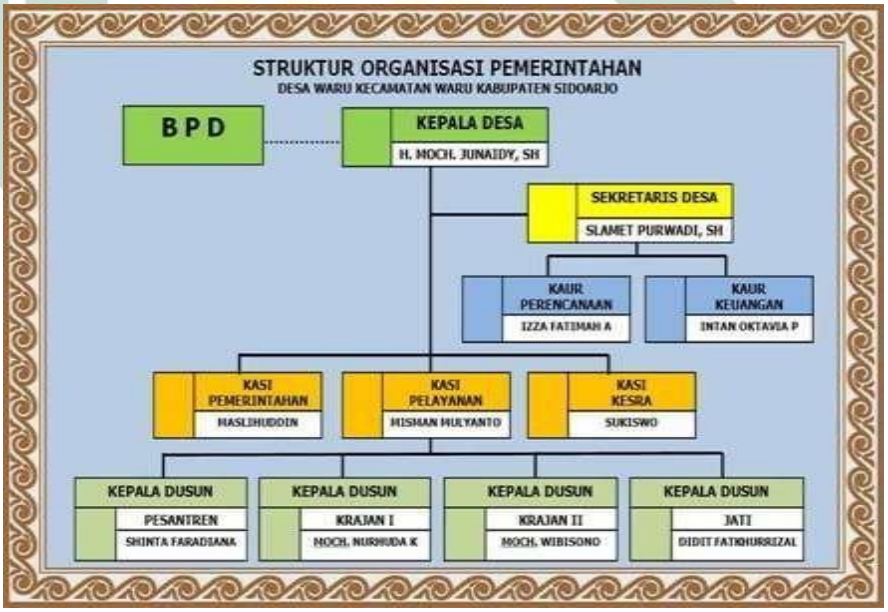

Sebagaimana dijelaskan pula dalam Peraturan Dupati Sidoarjo Nomor 54 tahun 2016 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dibawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab II Susunan

Organisasi Pasal 2

(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Sekretariat Desa;

b. Pelaksana Teknis; dan

c. Pelaksana Kewilayahan.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa dengan klasifikasi desa sebagai berikut:

a. Desa Swasembada;

b. Desa Swakarya; dan

c. Desa Swadaya.

(2) Klasifikasi Desa di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Untuk Desa dengan klasifikasi Swasembada, wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

(4) Untuk Desa dengan klasifikasi Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

(5) Untuk Desa dengan klasifikasi Swadaya, wajib memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi

Pasal 4

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur Staf Sekretariat.

(2) Untuk Desa dengan 3 (tiga) urusan, Sekretariat Desa terdiri atas :

a. urusan tata usaha dan umum;
b. urusan keuangan; dan
c. urusan perencanaan.

(3) Untuk Desa dengan 2 (dua) urusan, Sekretariat Desa terdiri atas :

a. urusan umum dan perencanaan; dan
b. urusan keuangan.

(4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 5

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(2) Untuk Desa dengan 3 (tiga) Seksi, Pelaksana Teknis terdiri atas:

a. seksi pemerintahan;
b. seksi kesejahteraan; dan
c. seksi pelayanan.

(3) Untuk Desa dengan 2 (dua) Seksi, Pelaksana Teknis terdiri atas:

a. seksi pemerintahan; dan
b. seksi kesejahteraan dan pelayanan

(4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

(3) Tugas Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

(1) Pembentukan susunan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

a. kewenangan yang dimiliki oleh Desa;
b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Desa;
c. kemampuan keuangan Desa; dan
d. ketersediaan sumber daya perangkat desa.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa Waru berjalan dengan baik sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Desa Waru tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku, dari Aparatur Pemerintah Desa hingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke RT/RW berjalan dengan baik, begitu juga dengan Lembaga-lembaga Desa Waru yang ada.

BAB III TUGAS DAN

FUNGSI Bagian Kesatu

Kepala Desa Pasal 8

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;

c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua

Sekretaris Desa

Pasal 9

(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, administrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan, arsip, dan ekspedisi;

b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana kerja pemerintah Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;

e. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. menyelenggarakan penyusunan rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dibantu oleh Kepala Urusan

sesuai bidang tugasnya masing-masing;

g. menyiapkan, menyusun bahan penyusunan APBDes, Perubahan APBDes, dan Perhitungan APBDes, dan pertanggungjawaban APBDes;

h. menyelenggarakan dan memberikan bimbingan dan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah

Desa;

i. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya;

j. membantu Kepala Desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas semua perangkat Desa;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil;

l. mengumpulkan, mengolah dan menginventarisir data administrasi Pemerintahan Desa;

m. melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Pemerintah Desa; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Kepala Urusan

Pasal 10

(1) Kepala Urusan sebagai unsur Staf Sekretariat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris Desa.

(2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan/ urusan pelayanan administrasi ketatausahaan dan pelayanan umum Pemerintahan Desa.

(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi:

a. menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi :

1. menyusun rencana dan program kerja Urusan Tata Usaha dan Umum untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya; dan
3. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah; dan
4. menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

b. melaksanakan administrasi yang meliputi :
1. urusan surat menyurat, perjalanan dinas, pelayanan umum, dan legalisasi;
2. urusan kearsipan;
3. urusan perlengkapan dan rumah tangga seluruh satuan organisasi pemerintahan Desa;
4. menyelenggarakan dan melaksanakan ketatausahaan Kepala Desa;
5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya;
6. monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya; dan
7. fasilitasi terhadap pelaksanaan dan/atau permasalahan sesuai bidang tugasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. mendata kekayaan Desa yang meliputi :

1. mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan kekayaan Desa;
2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi kekayaan Desa;
3. inventarisasi data tanah desa, bangunan desa, dan barang inventaris Desa; dan
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perubahan kekayaan Desa.

d. melaksanakan urusan rumah tangga Desa yang meliputi sarana prasarana Desa, kantor Desa, kebersihan. keindahan kantor/ lingkungan Desa, ketertiban dan keamanan kantor serta menyiapkan tempat/ peralatan rapat dan lain-lain;

e. menginventarisasi, merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik Desa;

f. membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

(4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pad ayat (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi:

a. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan pemerintahan Desa;

b. melaksanakan pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan Desa;

c. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan pemerintahan Desa;

d. melaksanakan pengurusan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;

e. melaksanakan pendataan potensi pendapatan dan kekayaan desa;

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

(5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. melaksanakan koordinasi urusan perencanaan pemerintahan Desa;
b. melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;
c. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
d. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan dan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa;
e. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanan dan evaluasi penggalian sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa;
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pemerintahan Desa;
g. melaksanakan penyusunan laporan pemerintahan Desa;
h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(6) Untuk Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, melaksanakan fungsi dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Keempat

Pelaksana Teknis

Pasal 11

(1) Kepala Seksi sebagai unsur pelaksana teknis, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dalam manajemen pemerintahan Desa.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang pemerintahan;

b. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;

c. menyusun rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa;

d. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan di Desa;

e. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;

g. melaksanakan manajemen kependudukan di Desa;

h. melaksanakan penataan dan pengelolaan serta pembinaan wilayah pedesaan;

i. pendataan dan pengelolaan Profil Desa;

j. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan;

k. melaksanakan pemberian fasilitasi tugas-tugas bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

l. pemberian fasilitasi terhadap pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);

m. menyusun laporan seksi pemerintahan;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:

a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana Desa;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. melaksanakan pembangunan dan pembinaan bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan Keluarga Berencana;

c. melaksanakan pemberian sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup;

d. melaksanakan pemberdayaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

e. pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data bidang pembangunan dan perekonomian;

f. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi kecil dan menengah serta kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;

g. pemberian pelayanan kepada masyarakat bidang pembangunan dan perekonomian;

h. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. penyelenggaraan administrasi pembangunan dan perekonomian di desa;

j. pemberian fasilitasi, pembinaan dan menyiapkan bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;

k. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;

l. pemberian fasilitasi dalam pengumpulan dan penyaluran dana/ bantuan bencana alam dan bencana lainnya;

m. melaksanakan pembinaan kegiatan pengumpulan Zakat, infaq dan sodaqoh;

n. pemberian fasilitasi pelaksanaan pengumpulan dana Palang Merah Indonesia (PMI);

o. pemberian fasilitasi administrasi pelaksanaan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR);

p. pemberian fasilitasi perawatan jenazah;

q. menyusun laporan Seksi Kesejahteraan;

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
b. melaksanakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat

   Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
c. melaksanakan upaya pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan;
d. melaksanakan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan;
e. menyusun laporan Seksi Pelayanan;
f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(6) Untuk Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, melaksanakan fungsi dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian Kelima

Pelaksana Kewilayahan

Pasal 12

(1) Pelaksana Kewilayahan atau Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

(2) Pelaksana Kewilayahan atau Dusun dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun mempunyai fungsi:

a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;

b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

e. melaksanakan kegiatan di bidang pelestarian adat istiadat dan pengembangan kehidupan gotong royong di wilayahnya;

f. melaksanakan Peraturan Desa dan produk hukum Desa lainnya di wilayah kerjanya;

g. melaksanakan kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya;

h. menyusun laporan tentang pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

***2.* Program Sistem Informasi Desa di Desa Waru**

Program sistem informasi desa, merupakan program pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang bertujuan untuk membuka potensi yang ada di wilayah Desa Waru. Petensi-potensi tersebut akan sangat efektif untuk dipublikasikan, dimungkinkan dapat berkembang dengan adanya sistem informasi desa, sehingga pemerintah dengan mudah membuka jalur pemasaran serta pembinaan. Potensi-potensi desa diharapkan dapat berkembang dengan adanya sistem informasi. dan dapat dijadikan sebagai produk unggulan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam sistem informasi desa juga juga terdapat beberapa informasi yang berkaitan dengan profil desa baik luas wilayah, maupun jumlah penduduk yang ada. Data-data tersebut telah tercover didalam SID, sehinga memudahkan pemerintah desa dalam pendataan apabila di butuhkan. Selain itu sistem informasi desa juga digunakan sebagai sarana informasi pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran atau bisa di sebut sebagai transparansi anggaran. Sarana ini digunakan agar masyarakat bisa ikut mengawasi setiap penggunaan anggaran, apakah sudah sesuai dengan fakta dilapangan. Sistem informasi desa dirancang untuk memberikan informasi yang cepat dan tepat. Serta masyarakat dapat mengetahui agaenda-agenda apa saja yang dilakukan oleh pemerenritah desa dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Fungsi selanjutnya dari sistem informasi desa adalah fungsi keterbukaan informasi secara online. Keterbukaan informasi berbasis online saat ini memang dibutuhkan dengan kondisi jumlah masyarakat besar, sehingga kebijakan ini dirasa sangat efektif untuk memudahkan pemerintah desa dalam melayani masyarakat. Selain itu masyarakat juga sangat diuntungkan dengan kebijakan ini, karena masyarakat dapat dengan mudah nedapatkan infromasi desa yang diperlukan dan tidak harus datang langsung kekantor desa. Masyarakat sangat terbantu dengan program ini, karena masyarakat desa waru mayoritas bekerja di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sektor industri (pabrik). Hampir tidak ada waktu datang kekantor desa untuk mengurus segala keperluan di kantor desa.

Namun ada beberapa masalah yang muncul dalam penerapan program ini. yakni lemahnya jaringan internet penunjang dan juga data base masyarakat yang masih belum optimal. Dengan berada di wilayah perkotaan dengan jaringan internet yang bagus, seharusnya berdampak pada lancarnya sistem keterbukaan informasi. Masalah jaringan internet operator yang tidak memadai membuat kebijakan digitalisasi tentang sistem informasi desa ini menjadi terhambat dan kurang optimal.

Masalah selanjutnya adalah masih belum sempurnanya data base masyarakat. Dengan data base masyarakat yang belum optimal, juga akan berpengaruh kepada system informasi yang akan ditampilkan, terkait dengan aspek kependudukan.

Pada prinsipnya peluncuran program sistem informasi desa, pemerintah desa waru telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama. Banyak dukungan serta bantuan dari semua pihak, sehingga program ini dapat berjalan meskipun ada beberapa masalah. Adapun kekurang yang terjadi pasti akan ada evaluasi demi perbaikan untuk keterbukaan informasi desa yangn lebih baik lagi.

Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa Waru melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing-masing perangkat hingga ke tingkat RT melaksanakanya, namun dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan masih terdapat hambatan-hambatan. Bagi Pemerintah Desa Waru apabila ada seorang ataupun sekelompok orang yang masih belum menerima program desa merupakan pekerjaan yang harus dicari penyelesainya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka dari Pemerintah Desa Waru mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut serta melakukan pendekatan-pendekatan guna memberikan pemahaman. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatanya dalam setiap penyelesaian masalah di desa, dan apabila di tingkat desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat Kabupaten Sidoarjo, melalui Kantor Kecamatan.

Dalam rangka pembangunan infrastruktur Desa Waru untuk menunjang sarana keterbukaan informasi desa berbasis online. Serta kegiatan pembangunan-pembangunan yang lain untuk menuju desa mandiri dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, diperlukan kontribusi yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa.

Semua elemen baik itu dari pemerintah desa maupun dari masyarakat, semua terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang ada. Sehingga dapat menjaga sarana yang telah disediakan oleh pemerintah desa. Didalam program desa, sistem informasi desa (SID) pemerintah membuka seluas-luasnya kepada masyarakat waru untuk melihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan desa, sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana-dana yang ada. Dengan dipublikasikannya pendanaan desa, merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat, serta bentuk transparansi anggaran.

Beberapa yang telah di publikasikan di Sistem informasi desa (SID) adalah, Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Waru masih mengandalkan berasal dari dana transfer baik yang berasal dari pusat atau dari kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil dan Retribusi. Sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan Desa Waru dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenanganya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa Waru dapat meningkatkan kemampuanya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa bersama dengan Pemerintah Desa. Partisipasi swadaya dana dan Gotong Royong tenaga/matrial menjadi lebih oftimal.

Gambar 4.3
Tampilan Sistem Informasi Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisa Dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Digitalitalisasi Tentang Sistem Informasi Desa di Desa Waru

Digitalisasi tentang sistem informasi desa menjadi perhatian penting dari banyak instansi pemerintah guna memberikan infomasi desa yang lebih baik lagi. Program ini sebetulnya sudah digagas lama oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas saran dari masyarakat, namun baru bisa terealisasi pada tahun 2018. Program ini adalah upaya dalam mengoptimalkan keterbukaan informasi desa waru kepada masyarakat.

Program ini digagas oleh pemerintah kabupaten berdasarkan pertimbangan dari berbagai aspek meliputi aspek sosial, ekonomi dan juga sumberdaya manusia yang ada di desa waru. Keadaan sosial di desa waru memang cukup baik, dengan semboyan wani rukun menjadikan warga hidup damai sehingga sangat sedikit sekali konflik yang ada. Warga dapat hidup berdampingan tanpa melihat suku, ras dan etnis yang ada. Didalam masyarakat juga terdapat berbagai organisasi, salah satunya organisasi terbesar yakni Nahdlatul Ulama. Banyak masyarakat desa Waru yang ikut kedalam organisasi tersebut. Organisasi ini juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, yang dapat merekatkan hubungan antar masyarakat.

Banyak masyarakat sudah melek digital sehingga program ini akan sangat mudah diterapkan. Didaerah waru khususnya, merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah yang dekat dengan kota, jaringan internet diwilayah ini tergolong bagus. Faktor kedekatan dengan ibu kota provinsi menjadikan desa waru mempunyai infrastruktur yang memadai. Juga dengan memiliki PAD yang cukup besar sehingga dapat berkembang dengan pesat.

Disisi lain ada aspek penting yang harus siap, yakni Sumber Daya Manusia (SDM), dengan berkembangnya sektor industri di desa waru, memeliki pengaruh kepada kualitas SDM yang dimiliki. Karena tuntutan pekerjaan yang mengaruskan masyarakat memiliki kemampuan khusus, baik meningkatkan intelektual diri dan juga kemampuan tehnik di sektor industri. Sehingga dapat meningkatkat kualitas sumberdaya yang dimiliki.

Faktor SDM juga memiliki peran yang krusial dalam penerapan kebijakan digitalisasi informasi desa berbasis online. SDM yang dimiliki desa waru. Selain itu dengan berkembangnya teknologi yang ada membuat masyarakat semakin bertambahnya wawasan nereka terhadap segala informasi yang muncul, baik iniformasi yang berkaitan dengan desa mapun daerah.

Dari ketiga aspek tersebut, merupakan penunjang berjalannya program ini. Program ini merupakan, program yang diharapkan oleh banyak masyarakat waru. Masyarakat banyak yang memberikan saran kepada pemerintah desa agar membuat sebuah kebijakan digitalisasi informasi desa, dengan adanya kebijakan tersebut dapat mempermudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi desa.

Meskipun sudah ada pelayanan online tetap akan ada pelayan offline artinya masyarakat bisa langsung datang kekantor desa waru guna mengurus surat yang diperlukan. Layanan ofline ini biasanya digunakan bagi masyarakat yang ingin langsung jadi dan dibawa pulang. Pemerintah desa waru pastinya tetap menjaga pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat yang ada. Kedepan diharapkan agar seluruh warga desa waru mengunakan system pelayanan online ini.

a. Era Digitalisasi Informasi Desa

Pemerintah desa waru berupaya untuk membuat sebuah keterbukaan informasi desa yang memudahkan baik aparatur desa maupun masyarakat. Sekarang ini banyak instansi pemerintah maupun swasta yang sudah menerapkan sistem informasi online kepada masyarakat di segala bidang. kebijakan ini merupakan bentuk respon dari pemerintah desa waru dalam menghadapi perkembangan jaman, juga dengan adanya sistem infomasi desa dapat memudahkan masyarakat guna mendapat informasi yang lebih baik lagi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa:

> *"kebijakan digitalisasi adalah merespon pekembangan jaman yang mana dalam era modern ini banyak aktifitas yang dilakukan secara cepat dan tanpa ribet-ribet. seperti halnya kemajuan teknologi yang ada di dunia. Pemerintahan desa sendiri juga ikut merespon dari*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua kebijakan yang ada baik itu dari pemerintah pusat atau daerah yang ingin menjadikan dunia digital menjadi suatu yang sangat penting dalam keterbukaan informasi desa".[57]

Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan. Jika dahulu di dalam sebuah negara kekuasaan lebih berpusat pada sisi pemerintahan (*supply side*), maka saat ini bergeser ke arah masyarakat (*demand side*), sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahnya menjadi semakin tinggi.[58]

Di era modern ini deperlukan pemerintahan yang dapat bekerja dengan kreatif dan inovatif sehingga pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perkembangan jaman. Implementasi kebijakan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada, dan juga akan mempermudah aspek informasi desa. Seperti yang disampaikan oleh bapak BPD Desa Waru:

[57]Bapak H. Moch. Junaidy selaku Kepala Desa dalam *wawancara* di Balai/Kantor Desa Waru, 24 April 2019

[58] Richardus Eko Indrajit, Electronic Government Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Sistem Informasi. (Jakarta, APTIKOM,2006), Hal 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"....kebijakan digitalisasi informasi desa berbasis online adalah untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi desa di desa atau kelurahan"*[59]

Program informasi desa berbasis online, fungsi utamanya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait desa. Informasi desa secara offline atau yang masih harus megikuti alur, dengan meminta surat pengantar dari RT/RW, akan sangat panjang dan begitu banyak memakan waktu. Terlebih banyak warga waru yang bekerja disektor industri sehingga untuk mengurus semua itu banyak yang tidak bisa. Ada beberapa masyarakat yang mempunyai harapan kepada pemerintah desa, agar membuat sebuah program yang dapat mempermudah bagi semua masyarakat dalam mendapatkan informasi desa yang baik dan juga efisien. Seperti yang disampaikan oleh masyarakat desa waru:

> *"....informasi desa di desa kita harus mengikuti alur bawa surat pengantar dari RT/RW sesuai dengan kebutuhannya. Namun ada beberapa masyarakat yang menginginkan adanya digitalisasi informasi desa yang memudahkan masyarakat"*[60]

Dari panjangnya alur birokrasi yang ada, menjadikan masyarakat berharap akan adanya sebuah kebijakan sistem informasi desa. Selain itu ternyata pemerintah kabupaten

---

[59] Bapak Drs. Mustamin selaku BPD Waru dalam *wawancara* di Balai/Kantor Desa Waru, 24 April 2019

[60] Bapak Sigit Selaku Masyarakat dalam *wawancara* di Rumah Bapak Sigit Desa Waru, 26 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sidoarjo juga memberikan instruksi kepada desa-desa untuk segera melakukan digitalisasi informasi desa berbasis online. Sehingga antara harapan warga dengan instruksi pemerintah kabupaten sudah selaras sehingga pemerintah desa tinggal merealisasikan.

Masyarakat berpendapat bahwa dalam mendapat informasi terkait desa dengan menggunakan pelayanan offline, harus melewati alur birokrasi yang sangat panjang dan banyak memakan waktu. Setelah adanya kebijakan digitalisasi informasi desa berbasis online sangat memangkas alur birokrasi yang ada sehingga dapat terlayani dengan baiki dan cepat. Banyak elemen yang menilai program ini sangat tepat dengan perkembangan jaman yang semakin modern, dan aparatur desa dituntut untuk inovatif dan kreatif dalam menghadapi tantangan ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa:

> *" sangat bagus karena cocok dengan perkembangan zaman maupun masyarakat yang saat ini berkutat dengan dunia digital yang dimana-mana serba online. Baik informasi desa atau pun yang lainnya "*[61]

Masyarakat sekarang lebih senang dengan hal yang serba online, dengan sistem online dirasa sangat memudahkan masyarakat, untuk mengurus surat sesuai dengan keperluan. Sebetulnya keterbukaan informasi desa dengan *system offline*

[61] Bapak H. Moch. Junaidy selaku Kepala Desa dalam *wawancara* di Balai/Kantor Desa Waru, 24 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didesa waru sudah cukup baik. Namun demi tercapainya keterbukaan informasi yang semakin memudahkan masyarakat, kebijakan digitalisasi informasi desa bebasis online ini diluncurkan demi memdapatkan keterbukaan informasi yang maksimal. Sepeti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa:

> *"setidaknya dengan kebijakan ini masyarakat dapat di bantu untuk mendapatakan informasi desa secara cepat dan maximal tanpa harus ribet dan mempermudah bagi masyarakat khususnya"*[62]

Dengan berkembangnya dunia digital. tentunya juga berdampak pada kinerja pemerintah desa. Dengan kebijakan digitalisasi informasi desa berbasis online, pemerintah desa juga sangat terbantu. Selain melayani masyarakat, pemerintah desa sekarang ini banyak tugas-tugas yang harus segera diselesaikan terkait dengan pembangunan dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh bapak BPD Desa Waru:

> *"kebijakan digitalisasi informasi desa berbasis online secara langsung membantu pemerintah yang saat ini sangat banyak tugas-tugas yang harus di kerjakan di samping sisi pelayanan"*[63]

Kebijakan digitalisasi informasi desa harus selalu memperhatikan setiap proses keterbukaan informasi yang ada. Dengan mengupayakan untuk meningkatkan komponen-

[62] Bapak H. Moch. Junaidy selaku Kepala Desa dalam *wawancara* di Balai/Kantor Desa Waru, 24 April 2019
[63] Bapak Drs. Mustamin selaku BPD Waru dalam *wawancara* di Balai/Kantor Desa Waru, 24 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komponen penunjang yang lebih memadai. Sarana dan prasarana menjadi komponen penting yang dimiliki, komponen ini menjadi kunci sukses terciptanya kebijakan informasi desa yang berbasis online. Selain sarana dan prasarana, ada komponen lain yakni aparatur desa. Aparatur desa ditutut bekerja secara cepat dan tepat, sehingga dapat digitalisasi informasi desa dapat berjalan efektif, serta memberikan jaminan kerahasiaan dari setiap transaksi yaitu menjaga kerahasiaan informasi data. Apabila memenuhi unsur-unsur tersebut diharapkan akan mencapai tujuan utama digitalisasi informasi desa yaitu mempermudah masyarakat desa Waru dalam memperoleh informasi desa yang benar. Memberikan informasi desa kepada masyarakat merupakan sebagai bentuk pengabdian pemerintah desa kepada masyarakat.

b. Implementasi kebijakan Tentang Sistem Informasi Desa Berbasis Online

Penerapan program digitalilasi informasi desa berbasis online didesa waru melalui beberapa unsur pemerintahan terkecil, yakni RT/RW yang siap mensosialisasikan di wilayahnya masing-masing. Proses informasi selalu disampaikan melalui forum-forum masyarakat baik lingkup RT maupun RW. Hal ini dirasa sangat efektif karena langsung disampaikan pada masyarakat sebagai *user*. Selain itu dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas wilayah dan juga banyaknya penduduk desa waru menjadikan peran RT dan juga RW sangat penting, demi suksesnya implementasi digitalisasi informasi desa berbasis online dan dapat berjalan dengan baik.

Aparatur desa juga terjun langsung dalam forum-forum tersebut guna meninjau serta memberikan informasi tentang digitalisasi informasi desa berbasis online ini. meskipun sudah menginstruksikan kepada RT dan RW namun tanggungjawab pemerintah desa tetap menangawal sosialisasi. Tujuan dari terjun langsung ini adalah untuk melihat apakah sosialisasi dapat berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu pemerintah daerah juga telah memberikan informasi ini melalui media online, seperti yang disampaikan oleh bapak Kepala Desa Waru:

> *"Sudah kami sosialisasikan kepada masyaraat setempat melalui RT atau RW saat kegiatan di masing wilayah desa waru sendiri. Bahkan melalui media online dan di kabupaten Sidoarjo sendiri sudah di intruksikan untuk melakukan kegiatan tersebut"*[64]

Memang informasi-informasi yang berkaitan dengan digitalisasi informasi desa berbasis online sudah sering disampaikan oleh aparatur desa kepada RT/RW dan kemudian disampaikan kepada masyarakat. Sehingga informasi ini

[64] Bapak H. Moch. Junaidy selaku Kepala Desa dalam *wawancara* di Balai/Kantor Desa Waru, 24 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya sudah diterima oleh seluruh masyarakat desa waru. Seperti yang disampaikan oleh bapak BPD Desa Waru:

> *"sudah sering di informasikan kepada rt atau rw yang ada di lingkungan desa waru"*[65]

Namun disini ada pernyataan yang menarik antara pernyataan Kepala Desa dan anggota BPD dengan masyarakat desa waru. Dimana pemerintah desa dan BPD menyatakan program ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat melalui RT/RW. Namun pada kenyataanya memang ada sebagian masyarakat yang menyatakan belum menerima informasi ini. Seperti pernyataan dari masyarakat desa waru.[66]

> *"Sepertinya belum, karena di desa belum ada informasi untuk program atau kebijakan ini"*

Dari pernyataan masyarakat, memang belum pernah mendapat informasi secara langsung dari RT ataupun RW. Memang benar pemerintah desa sudah menyampaikan informasi kebijakan digitalisasi informasi desa berbasis online kepada RT/RW, namun sebagian dari RT maupun RW tersebut belum menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Karena dilihat dari wilayah masing-masing RT /RW memang berbeda-beda, ada wilayah yang lingkungan pemukiman padat

[65] Bapak Drs. Mustamin selaku BPD Waru dalam *wawancara* di Balai/Kantor Desa Waru, 24 April 2019
[66] Bapak Sigit Selaku Masyarakat dalam *wawancara* di Rumah Bapak Sigit Desa Waru, 26 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk, dan ada juga yang wilayahnya lingkungan perumahan, sehingga ada perbedaan kendala yang dihadapi di masing-masing wilayah. Namun pihak RT mapun RW akan tetap mengupayakan untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat desa waru.

Dalam sosialisasi tersebut desampaikan beberapa point yakni salah satunya adalah informasi akses tentang website desa. Sekarang desa waru sudah memiliki website desa sendiri, namun ada beberapa data yang masih perlu dibenahi. Dari sosialisasi tersebut juga disampaikan bagaimana alur dari digitalisasi informasi desa berbasis online ini. Dengan model informasi online ini, akan sangat memudahkan bagi masyarakat karena memangkas alur birokrasi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dan Menghambat Dalam Implementasi Kebijakan Digitalitalisasi Tentang Sistem Informasi Desa di Desa Waru

Dalam penerapan sistem informasi desa, memang masih menemuni beberapa kendala. Namun antusiasme masyarakat yang mendukung, memberikan motivasi untuk pemerintah desa untuk segera menyelesaikan persoalan yang ada. Kendala-kendala yang terjadi memang bermacam-macam salah satunya yakni penyampaian informasi kepada masyarakat yang masih belum merata. Sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digitalisasi informasi desa yang berbasis online ini masih belum maksimal.

Dukungan dan harapan seluruh masyarakat desa waru terkait dengan adanya program digitalisasi informasi desa berbasis online ini sangat besar. Dibuktikan dengan antusiasme masyarakat desa waru dalam forum sosialisasi program ini. Meskipun ada beberapa yang masih belum sadar akan pentingnya digitalisasi informasi desa online bagi masyarakat.

a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Digitalitalisasi Tentang Sistem Informasi Desa di Desa Waru

Didalam program digitalisasi informasi desa yang berbasis online ada faktor yang menjadi pendukung didalam program ini, salah satunya adalah suportnya masyarakat dengan program ini, karena kebijakan ini muncul merupakan saran dari masyarakat. Masyarakat berharap agar ada keterbukaan informasi desa dari pemerintah desa agar lebih memudahkan masyarakat dalam mengurus surat-surat yang diperlukan. Sebelum adanya program digitalisasi informasi desa berbasis online memang untuk mengurus satu surat saja masyarakat harus meminta surat pengantar dari RT dan RW. Sehingga hal itu yang dirasa menjadi sebuah problem, begitu panjangnya alur untuk mendapatkan satu surat saja. Dukungan dari warga untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cepat mengoptimalkan program ini, seperti yang disampaikan berikut ini:

> *"Pendapat saya harus segera di optimalkan apabila program ini sudah ada, karena ini program yang sangat bagus sehingga masyarakat sepeerti kami dapat terbantu dengan adanya program tersebut"*

Selain mendapat dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah juga memberikan instruksi terkait dengan penyelenggaraan digitalisasi informasi desa berbasis online. Dalam sistem ini selain digunakan dalam keterbukaan informasi desa, juga terdapat beberapa informasi terkait dengan desa maupun daerah sehingga ada peran ganda dalam program ini. informasi-informasi terkait profil desa meliputi jumlah penduduk, wilayah dan juga produk-produk unggulan desa.

Sehingga desa dapat terberdayakan melalui program ini, karena setiap desa akan mengeluarkan setiap produk-produk unggulannya. Juga masyarakat akan semakin kreatif dan inovatif dalam membuat suatu produk, dan akan didampingi oleh pemerintah desa guna untuk menjadi sebuah produk unggulan desa waru.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah desa waru dalam mewujudkan program sistem informasi desa menajdi kenyataan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada hal yang harus dimiliki oleh pemerintah desa waru sehubungan dengan program ini, yaitu Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk merealisasikan terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa desa Waru bisa dikategorikan sebagai desa yang mapan artinya minimnya angka kemiskinan masyarakat desa waru. Program ini akan sulit apabila tidak di dukung oleh finansial masyarakat yang rendah. Selain finansial masyarakat financial pemerintah desa juga harus kuat., demi dapat merealisasikan program ini.

Ada juga faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya yakni, Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan. SDM menjadi sangat penting karena pihak pemerintah desa sebagai pihak oerator program tersebut sebagai pemegang kunci lancarnya peyanan kepada masyarakat. Selain itu masyarakat juga dijadikan pertimabangan dalam program ini karena SDM masyarakat juga dijadikan patokan apakah masyarakat mampu menggunakan program ini. SDM sangat penting bagi pemerintah desa maupun bagi masyarakat sebagai *user*, agar penerapan sistem pelayanan ini dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Digitalitalisasi Tentang Sistem Informasi Desa di Desa Waru

Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% menjadi kunci keberhasilan konsep kebijakan ini. ketersediaan infrastruktur guna menunjang digitalisasi informasi desa berbasis online tidaklah gampang, karena membutuhkan anggaran yang cukup besar demi mewujudkan program ini

Pemerintah desa dalam menyiapkan infrastruktur sudah tergolong memadai. Tinggal ada beberapa masalah terkait dengan jaringan internet di kantor desa yang masih lemah sehingga masih sangat belum optimal dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa:

> *"dari segi sarana dan prasana perlengkapan kita sudah cukup memadai namun sangat di sayangkan oleh pemerintah desa sendiri bhawa untuk akses internet atau intra net sangat rendah daya kecepatannya itulah yang membuat sedikit kendala yang ada disini. bahkan di tempat yang lainnya. sebenarnya dari segi pelayanan belum maximal karena masih terkendala bebera faktor. Namun akan kami coba diskusikan dengan pihak kecamatan selaku pembina dari desa"*[67]

[67] Bapak H. Moch. Junaidy selaku Kepala Desa dalam *wawancara* di Balai/Kantor Desa Waru, 24 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masih belum maksimalnya kebijakan digitalisasi informasi desa karena beberapa faktor, masih rendahnya kecepatan internet menjadi sedikit kendala yang harus segera diatasi, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Selain itu ada faktor lain yang menjadi penghambat dari program ini yakni, belum meratanya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang mengerti tentang program ini.

Luasnya wilayah dan perbedaan lingkungan setiap RT ataupun RW terdapat perbedaan masalah yang terjadi. Didesa waru sendiri setiap wilayah RT ataupun RW berbeda-beda, ada yang lingkungan rumah padat penduduk ada juga perumahan. Sehingga terkadang yang wilayahnya di perumahan, akan menemui beberapa kendala yaitu kehadiran masyarakat apabila adakan dalam satu forum. Sehingga RT ataupun RW setempat mau tidak mau harus jemput bola, dengan mendatangi satu rumah kerumah lainnya.

Kemudian ada faktor penghambat yang lain, yakni masalah database masyarakat yang masih belum optimal. Data base masyarakat atau identitas penduduk desa waru yang digunakan untuk keperluan sinkronisasi data, sehingga nantinya data penduduk tersebut akan digukan sebagai langkah awal untuk melihat identitas pemohon pada saat pelayanan. Seperti pernyataan kepala desa berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari segi faktor yang pertama adalah data base masyarakat desa atau identitas penduduk yang ada karena perlu adabya sinkronisasi data oleh sistem sehingga menjadikan langka awal dari pelayanan tersebut. Kedua dari segi jaringan atau koneksi internet yang kurang bagus sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi. Ketiga peran masyarakat yang sangat kurang dengan kebijakan yang telah di sosialisaiskan kepada masyarakat"[68]

Kemudian ditambahkan lagi oleh Anggota BPD sebagaimana dibawah ini"

"Sepertinya kendala utama adalah koneksi jaringan internet, dan data data yang di butkan untuk dapat mengakses atau menjangkau sesuai kebutuhan pelayana masyarakat."

Permasalahan–permasalahan teknis yang menjadi penghambat dari program ini, tetapi program ini tetap berjalan meskipun dengan pelayanan yang masih belum maksimal, sembari menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

D. Temuan Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara serta penyajian data yang ada dibutuhkan suatu kesimpulan guna pengambilan inti permasalahan dari penyajian data yang telah di dapat dari penelitian. selanjutnya hasil dari temuan penelitian ini bahwa permasalahan implementasi kebijakan digitalitalisasi tentang sistem informasi desa di Desa Waru. Manfaat utama dari implementasi

[68] Bapak H. Moch. Junaidy selaku Kepala Desa dalam *wawancara* di Balai/Kantor Desa Waru, 24 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan digitalitalisasi tentang sistem informasi desa sangat membantu dalam hal keterbukaan informasi desa. Berdasarkan hasil penyajian dan analisa data yang telah diperoleh di lapangan, penulis akan memaparkan hasil temuan peneltian sebagaimana dibawah ini

Tabel 4.6
Temuan Hasil Penelitian

No.	Hasil Temuan	Keterangan
1.	Belum memadainya sarana dan prasarana	Dari hasil wawancara diketahui belum memadainya sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat menghambat berjalannya kebijakan tersebut.
2.	Inidvidu yang diberi kewenagan belum menguasai sistem yang dipakai	Dalam sebuah kebijakan pasti ada individu yang diberi kewangan, dalam hal ini operator yang ada belum menguasai sistem yang dipakai ini berakibat tidak maksimalnya penggunaan sistem ini.
3	*Data base* yang akan digunakan belum lengkap	Lebih lanjut lagi sebuah kebijakan pastinya ada data guna mendukung berjalannya kebijakan ini dalam pengimplementasian kebijakan digitalisasi tentang sistem informasi desa data yang ada belum lengkap.
4.	Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah desa.	Dapat dilihat bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa menjadi salah satu kendala dalam berjalannya kebijakan ini.
5.	Informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah desa tidak maksimal	Dari hasil wawancara diketahui bahwa memang ada sebagian masyarakat yang menyatakan belum menerima informasi terkait dngan digitalisasi tentang sistem informasi desa ini akibat dari penyampaian informasi dari pihak desa yang tidak maksimal
6.	Digitalisasi informasi desa berbasis online belum terlaksana akibat kurangnya fasilitas	Kemudian peneliti menemukan bahwa kebijakan digitalisasi informasi desa berbasis online, fungsi utamanya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mendpat keterbukaan informsi desa. Hanya saja di Desa waru digitalisasi informasi desa yang berbasis online belum terlaksana

Berdasarkan rician tabel diatas hasil temuan dilapangan dapat dijabarkan kembali melalui penjelasan berikut ini :

1. ***Belum memadainya sarana dan prasarana***

Dari hasil wawancara diketahui belum memadainya sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat menghambat berjalannya kebijakan tersebut, karena dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai secara tidak langsung dapat memepermudah jalannya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah serta individu yang diberi kewangan untu menangani kebijakan terkait implementasi digitalisasi tentang sistem informasi desa juga bisa bekerja secara maksimal.

2. ***Inidvidu yang diberi kewenangan belum menguasai sistem yang dipakai***

Dari hasil wawancara diketahui jika Dalam sebuah kebijakan pasti ada individu yang diberi kewangan, peneliti menemukan fakta jika individu yang ditunjuk untuk menjadi operator dalam menjalankan kebijakan digitalisasi sistem informasi desa ini belum menguasai sistem atau aplikasi yang dipakai sehingga ketidakpahaman operator berakibat tidak maksimalnya penggunaan sistem atau aplikasi yang digunakan.

3. ***Database yang akan digunakan belum lengkap***

Lebih lanjut lagi sebuah kebijakan pastinya ada *database* guna mendukung berjalannya kebijakan ini dalam pengimplementasian kebijakan digitalisasi tentang sistem informasi desa nyatanya dalam kebijakan ini untuk Desa Waru sendiri peneliti menemukan bahwa *database* yang akan digunakan sebagai acuan

untuk pengimplementasiannya itu kurang lengkap sehingga kebijakan ini khusus di Desa waru masih belum terlaksana dengan baik karna terkendala *database* yang kurang lengkap.

4. ***Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah desa***

Dari hasil pengamatan serta wawancara dengan informan, peneliti menemukan fakta bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa menjadi salah satu kendala dalam berjalannya kebijakan ini akibatnya masyarakat masih banyak yang belum tahu terkait kebijakan digitalisasi tentang sistem informasi desa yang da di Desa Waru itu menjadikan masih belum maksimalnya kebijakan ini.

5. ***Informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah desa tidak maksimal***

Dari hasil wawancara diketahui bahwa memang ada sebagian masyarakat yang menyatakan belum menerima informasi terkait dengan digitalisasi tentang sisitem informasi desa ini akibat dari penyampaian informasi dari pihak desa yang tidak maksimal.

6. ***Digitalisasi informasi desa berbasis online belum terlaksana akibat kurangnya fasilitas***

Kemudian peneliti menemukan bahwa kebijakan digitalisasi informasi desa berbasis online, fungsi utamanya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mendpat keterbukaan informsi desa. Hanya saja di Desa waru digitalisasi informasi desa yang

berbasis online belum terlaksana akibat kurangnya fasilitas penunjang untuk mengimplemnetasikan kebijakan digitalisasi infromasi desa.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan uraian mengenai Implementasi Kebijakan Digitalitalisasi Tentang Sistem Informasi Desa di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan digitalitalisasi tentang sistem informasi desa Di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Pertama implementasi kebijakan ini melalui sosialisasi beberapa unsur pemerintahan terkecil yakni RT maupun RW yang siap mensosialisasikan di wilayahnya masing-masing. Proses sosialisasi ini disampaikan melalui forum-forum masyarakat baik lingkup RT maupun RW dan langsung disampaikan pada masyarakat sebagai *user*. Namun proses implentasi ini masih belum optimal karena kurang meratanya informasi kepada masyarakat. Dilihat dari wilayah masing-masing RT /RW memang berbeda-beda, ada wilayah yang lingkungan pemukiman padat penduduk, dan ada juga yang wilayahnya lingkungan perumahan, sehingga ada perbedaan kendala yang dihadapi di masing-masing wilayah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam implementasi kebijakan digitalitalisasi tentang sistem informasi

desa Di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Faktor yang mendorong program ini adalah supportnya masyarakat dengan sebuah sistem yang semakin memudahkan. Faktor lainya yang menjadi pendukung dari program ini, adalah tersedianya dua aspek penting yakni sumberdaya finansial desa dan juga sumberdaya manusia. Sedangkan faktor Penghambat dari implementasi digitalisasi informasi desa yakni faktor kurang optimalnya database masyarakat dan juga kualitas kecepatan internet milik desa yang menjadi penyebab kurang maksimalnya kebijakan ini.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan analisa oleh peneliti. Maka bagian akhir dari penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran yang bertujuan untuk bisa memberikan gambaran yang lebih baik dari sebelumnya.

1. Riset tentang kebijakan publik dalam politik sangat menarik, karena kebijakan tampil dengan dalam merespon fenomena dalam era digitalisasi
2. Untuk peneliti selanjutnya, tema kebijakan publik dapat pergunakan sebagai sumber referensi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

AG, Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi.2000. *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

Budiardjo, Miriam.2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Fajar Interpratama.

Deegan, C., 2002. Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosure – a Theoritical Foundation, Accounting, Auditing and Accountibility Journal, Vol. 15, No. 3

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, Washington

Eko Indrajit, Richardus, 2006 Electronic Government Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Sistem Informasi. Jakarta, APTIKOM.

Gaffar, Affan. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Islamy, M Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung, Sinar baru Offset.

Moelong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mulyanto, Agus. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Neneng Asaniyah, "PELESTARIAN INFORMASI KOLEKSI LANGKA: Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi", Pustakawan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: Buletin Perpustakaan No. 57 Mei 2017

Rahman. A, 2007 . Sistem Politik Indonesia, yogyakarta, Graha Ilmu,

Santosa, Pandji, 2008, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT.Reflika Aditama.

Silalahi, Ulber.2010. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama

Soenarko. 2000. *Public Policy Pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan pemerinta.* Surabaya, Airlangga Univercsity Press.

Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Yogyakarta : UNY Press.

Syaifuddin.2010. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik.* Malang : Bayumedia Publishing

Winarno, Budi. 2005.Kebijakan Publik : Teori Dan Proses Edisi Revisi,Media Presindo.Yogyakarta.

Internet

http://ikramshare.blogspot.co.id/2015/08/e-government-era-teknologi-peningkatan.html. (12 Februari 2017, 19.45. Wib)

http://kedesa.id/id_ID/wiki/pembangunan-desa-pembangunan-kawasan-perdesaan-dan-kerjasama-desa/sistem-informasi-desa diakses pada 12 Februari 2020 pukul 23.28

http://pusattesis.com/tesis-pelayanan-implementasi-kebijakan-pelayanan-administrasi-terpadu/ diakses pada 02 -11-2018 pukul 13,25

http://sid.sidoarjokab.go.id/waru-waru/index.php/first (diakses pada Kamis, 19 Januari 2019 pukul 21:24 WIB)

https://www.opensid.info/ diakses pada 22-02-2019 (pukul 10.15)